



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2025–2029

KABUPATEN TANA TIDUNG





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KESEHATAN
Alamat. Jalan Perintis KM I RT VI Tideng Pale, Kaltara 77152

KEPUTUSAN
KEPAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG
Nomor :B.000.7.4/157/SK-RENSTRA/DINKES-KTT/IX/2025

Tentang

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dengan Perda No.02 Tahun 2025, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dan stakeholders dalam pembangunan daerah Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021 Nomor 65)
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 - 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BAB V : Penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029, dan merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 16 September 2025



H. MOHAMAD SARIF, S.Pi., M.HP
NIP. 19790201 200012 1 003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kesehatan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung setiap tahunnya, serta menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat Tana Tidung yang sehat, produktif, dan sejahtera. Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, sebagai modal utama pembangunan daerah.

Tana Tidung, Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan



H. Mohamad Sarif., S.Pi., M.HP
NIP.19790201 200012 1 003



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	I	1
1.2	Landasan Hukum	I	2
1.3	Maksud dan Tujuan	I	4
1.4	Sistematika Penulisan	I	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II	1
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II	1
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	II	1
	2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	II	5
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	II	25
	2.1.4 Inovasi dan Penghargaan	II	37
	2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan	II	40
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II	40
	2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	II	41
	2.2.2 Telaah Isu Strategis	II	42
	2.2.3 Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan	II	46
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III	1
3.1	Tujuan dan Sasaran	III	1
3.2	Strategi dan Kebijakan	III	4
	3.2.1 Strategi	III	4
	3.2.2 Kebijakan	III	5
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV	1
	4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD	IV	1
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV	205
BAB V	PENUTUP	V	1



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025	II	6
Tabel II.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025	II	7
Tabel II.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025	II	8
Tabel II.4	Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Kesehatan Tahun 2024	II	10
Tabel II.5	Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap di RSUD AKHMAD BERAHIM Tahun 2024	II	11
Tabel II.6	Jumlah Alat Kesehatan di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2024	II	12
Tabel II.7	Data Ketersediaan Gedung/Ruangan di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2024	II	15
Tabel II.8	Aset Tanah Dinas Kesehatan	II	17
Tabel II.9	Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan	II	21
Tabel II.10	Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	II	25
Tabel II.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	27
Tabel II.12	Uraian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	29
Tabel II.13	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	31
Tabel II.14	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	31
Tabel II.15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL) di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	31
Tabel II.16	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024	II	32
Tabel II.17	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024	II	34
Tabel II.18	Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2020 – 2024	II	38
Tabel II.19	Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2020 – 2024	II	39
Tabel II.20	Teknis Merumuskan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	II	48
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	III	2
Tabel III.2	Tahapan Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	5
Tabel III.3	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	6
Tabel III.4	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	7
Tabel IV.1	Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	IV	2
Tabel IV.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	IV	75
Tabel IV.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	185
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	206



Tabel IV.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	207
Tabel IV.6	Indikator SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	215



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025	II	8
Gambar II.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025	II	9
Gambar II.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	28
Gambar II.4	Prevalensi Stunting Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	29
Gambar II.5	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Fokus utama dinas ini adalah memperluas akses layanan kesehatan dasar yang merata hingga ke wilayah terpencil, memperkuat kapasitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang terstruktur dalam menyusun tahapan-tahapan kegiatan, yang melibatkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan guna mengalokasikan serta memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Tujuan utama pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pada hakikatnya hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan dilaksanakan secara konsisten sebagai landasan awal yang krusial, sehingga arah pembangunan tetap terjaga fokusnya dan mampu menghasilkan dampak yang optimal.

Perencanaan strategis berfungsi sebagai mekanisme yang menyelaraskan kapasitas sumber daya manusia dengan beragam potensi sumber daya lainnya yang tersedia dalam organisasi, dimana integrasi tersebut ditujukan untuk memastikan lembaga pemerintah mampu merespons secara adaptif perubahan lingkungan strategis pada tingkat lokal, nasional, maupun global, sekaligus tetap konsisten berada dalam kerangka sistem pemerintahan yang telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan fundamental yang menjadi landasan dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Renstra tidak hanya berfungsi sebagai panduan kebijakan dan arah strategis perangkat daerah, tetapi juga sebagai dokumen pengendali yang memastikan setiap langkah kebijakan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, dan terukur. Melalui Renstra, OPD diharapkan mampu merancang prioritas pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Renstra merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Renstra menjadi instrumen strategis yang memungkinkan perangkat daerah melakukan refleksi atas kondisi eksisting, mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan, serta merumuskan sasaran dan indikator kinerja yang relevan dalam menjawab dinamika pelayanan publik. Penyusunan dokumen ini menuntut pendekatan berbasis data dan analisis



mendalam agar arah kebijakan yang ditetapkan dapat mendorong transformasi kelembagaan dan pencapaian hasil pembangunan yang berdampak nyata.

Dalam konteks penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, perencanaan dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini menegaskan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RPJPD, dan dokumen sektoral lainnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan daerah, meningkatkan integrasi kebijakan lintas sektor, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkualitas.

Keberadaan Renstra berperan strategis dalam penguatan akuntabilitas birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja, Renstra mengarahkan setiap program dan kegiatan untuk berorientasi pada hasil, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga instrumen reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berintegritas.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka Dinas Kesehatan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang layanan kesehatan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kesehatan Tana Tidung sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah



- Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029; dan
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan sebagai kerangka acuan utama yang bersifat strategis dan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Dokumen ini disusun untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, memperjelas arah pembangunan sektoral, serta memastikan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi hasil dalam periode lima tahun ke depan, yakni tahun 2025 hingga 2029.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan perwujudan dari transformasi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pendekatan berbasis kinerja (*performance-based planning*), sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus dapat ditelusuri kontribusinya

terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, prioritas daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya bidang Kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran pelayanan Perangkat daerah yang dijabarkan melalui gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan. Tidak hanya itu, dijelaskan juga mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tana Tidung yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tidak hanya itu, disajikan mengenai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU PD dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK.

BAB V Penutup



Berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

a. Uraian Tugas Dinas Kesehatan

Unsur organisasi dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Teknis dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;



- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

2) Sekretariat

Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan umum;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- n. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kesehatan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Dalam melaksanakan

tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung pembangunan masyarakat yang sehat, inklusif, dan sejahtera. SDM yang kompeten di bidang kesehatan meliputi individu yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan program-program kesehatan, mulai dari pencegahan, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif. Adapun sumber daya manusia di Dinas Kesehatan terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas dalam berbagai unit kerja sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.

Dengan dukungan SDM yang berkualitas, Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program kesehatan terlaksana dengan baik, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang



sehat dan produktif. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Fasilitas Kesehatan
di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Fasilitas Kesehatan	ASN	Umum Non ASN	Nakes Non ASN	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	56	7	0	63
2	RSUD Akhmad Berahim	220	81	33	334
3	RS Tipe D Pratama Tanjung Kramat	36	12	9	57
4	Puskesmas Tideng Pale	55	4	0	59
5	Puskesmas Sesayap Hilir	56	6	3	65
6	Puskesmas Tana Lia	43	2	1	46
7	Puskesmas Kujau	47	5	5	57
8	Puskesmas Muruk Rian	38	2	2	42
Total		551	119	53	670

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawahnya yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kabupaten pada tahun 2025 adalah sebanyak 670 orang (data per September 2025). Distribusi SDM menunjukkan bahwa **RSUD Akhmad Berahim** menjadi fasilitas dengan jumlah tenaga terbanyak, yaitu **334 orang** (220 ASN, 33 Nakes non-ASN, 81 Umum non-ASN). Hal ini wajar mengingat rumah sakit merupakan pusat rujukan yang membutuhkan sumber daya lebih banyak dibandingkan puskesmas. Untuk tingkat puskesmas, jumlah SDM berkisar antara **42 sampai 65 orang**. Puskesmas dengan jumlah tenaga terbesar adalah **Puskesmas Sesayap Hilir** (65 orang), sementara yang terkecil adalah **Puskesmas Muruk Rian** (42 orang). Perbedaan jumlah ini mencerminkan variasi kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah. Dinas Kesehatan sendiri memiliki **63 orang pegawai**, dengan komposisi mayoritas ASN (56 orang). Jumlah ini berperan penting dalam mendukung fungsi manajerial, pembinaan, serta pengawasan program kesehatan di daerah.

Secara umum, proporsi terbesar SDM masih didominasi oleh ASN, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pegawai negeri. Namun demikian, keberadaan non-ASN, khususnya tenaga kesehatan (53 orang), memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung pelayanan dasar di lapangan. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan SDM ke

depan, terutama untuk menjaga pemerataan tenaga kesehatan antar-fasilitas serta mengoptimalkan peran non-ASN dalam mengisi kekosongan tenaga di daerah yang masih kekurangan.

Dari 551 orang ASN ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

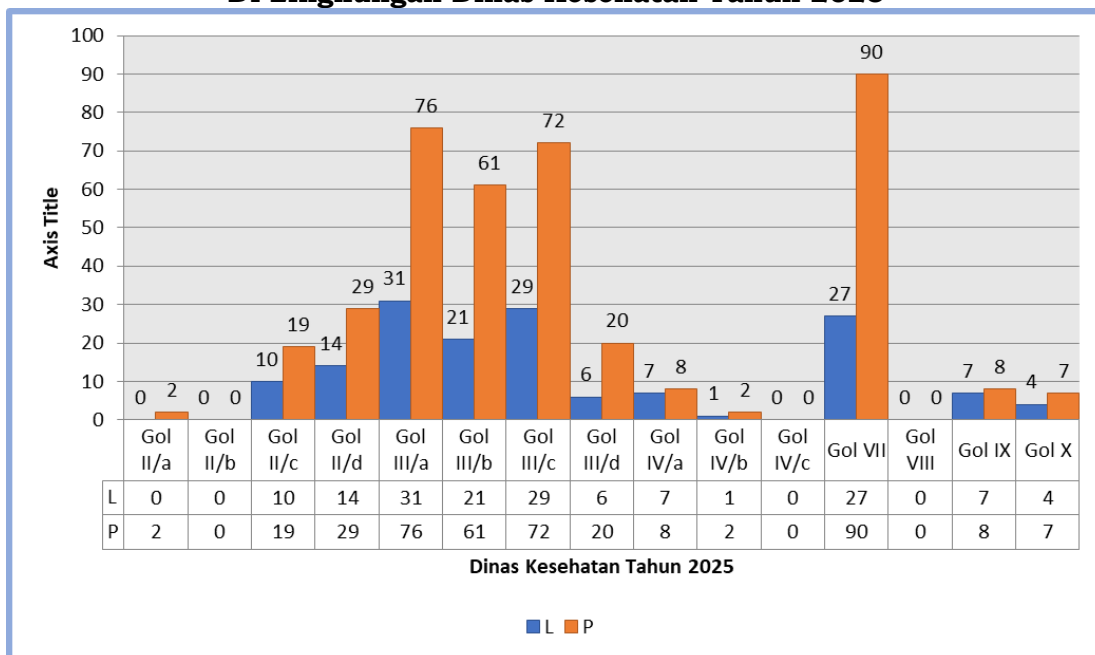
Tabel II.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IIa	0	2	2
2	Golongan IIb	0	0	0
3	Golongan IIc	10	19	29
4	Golongan IId	14	29	43
5	Golongan IIIa	31	76	107
6	Golongan IIIb	21	61	82
7	Golongan IIIc	29	72	101
8	Golongan IIId	6	20	26
9	Golongan Iva	7	8	15
10	Golongan IVb	1	2	3
11	Golongan IVc	0	0	0
12	Golongan VII	27	90	117
13	Golongan VIII	0	0	0
14	Golongan IX	7	8	15
15	Golongan X	4	7	11
Total		157	394	551

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan golongan paling banyak adalah pegawai dengan Golongan IIIa yakni sebanyak 107 orang, sedangkan paling sedikit adalah pegawai dengan Golongan IIa yakni 2 orang. Sedangkan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbanyak di Golongan VII dengan jumlah sebanyak 117 orang dan paling sedikit tersedia di Golongan X yakni sebanyak 11 orang. Rasio jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, diketahui lebih banyak pegawai berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki. Komposisi pegawai berdasarkan golongan juga dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

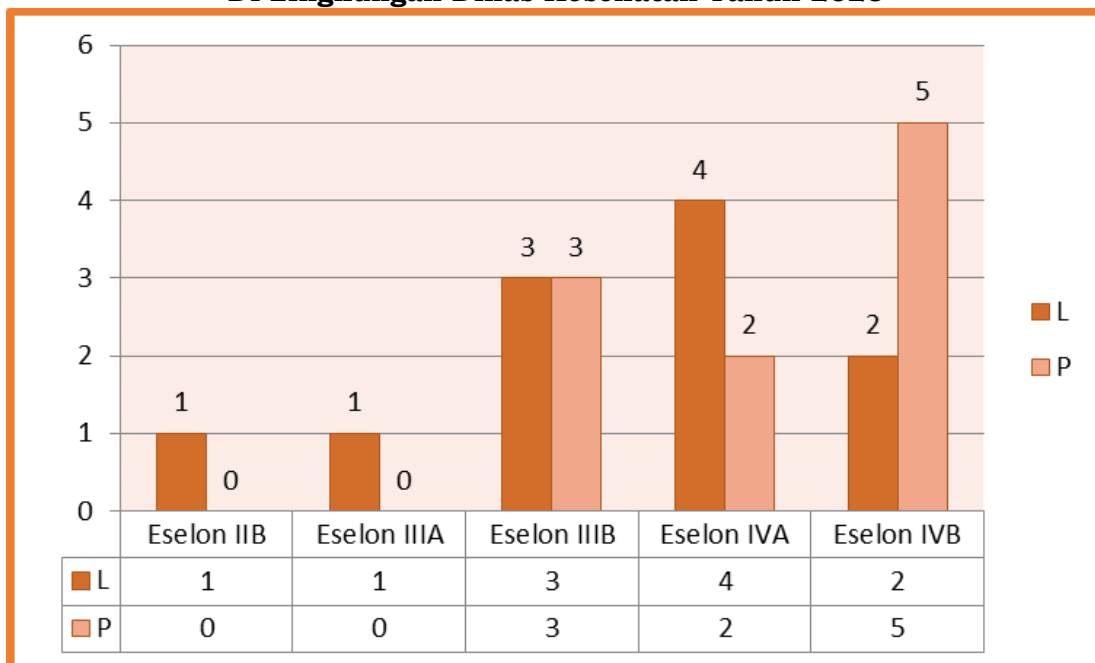
Tabel II.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Struktural & Fungsional	L	P	Jumlah
1	Eselon IIB	1	0	1
2	Eselon IIIA	1	0	1
3	Eselon IIIB	3	3	6
4	Eselon IVA	4	2	6
5	Eselon IVB	2	5	7
TOTAL		11	10	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebanyak 21 orang, dengan komposisi paling banyak pejabat eselon IVB yakni sebanyak 7 orang. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural juga dalam dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2025



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran tidak hanya mendukung kelancaran administrasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pegawai. Infrastruktur yang memadai menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mampu mendorong pelayanan publik yang lebih baik.

Sarana dan prasarana perkantoran di Dinas Kesehatan memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran operasional, efektivitas kerja, serta pelayanan baik internal maupun eksternal. Sarana utama meliputi meja dan kursi kerja yang ergonomis untuk kenyamanan pegawai, komputer atau laptop untuk pengolahan data, serta perangkat pendukung seperti printer untuk kebutuhan administrasi. Tidak ketinggalan, lemari berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen penting yang terorganisir maupun peralatan kantor lainnya. Selain itu, Dinas Kesehatan memiliki gedung perkantoran yang memadai yang menyediakan ruang kerja yang nyaman, ruang kepala dinas, serta ruang teknis. Sedangkan jaringan teknologi informasi, seperti internet tersedia sehingga semakin meningkatkan efisiensi, terutama di era digitalisasi. Kendaraan dinas juga menjadi sarana penting untuk menunjang mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas di luar kantor.

Kelengkapan sarana dan prasarana ini berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.



**Tabel II.4
Jumlah Kendaraan Bermotor
Dinas Kesehatan Tahun 2024**

Dinas Kesehatan Tahun 2024						
No	Jenis Kendaraan	Tahun	Tipe/Merk Kendaraan	Jumlah		
I	Kendaraan Roda Empat			B	RR	RB
1.	Kendaraan dinas Bermotor lainnya	2010	Isuzu NRH 55 EA Mikrobus 2.771 CC			2
2.	Kendaraan dinas Bermotor lainnya	2012	Toyota Avanza Veloz	1		
3.	Kendaraan dinas Bermotor lainnya	2013	TOYOTA HILUX PICK UP 2.5L DSL MT			1
4.	Mobil Ambulance	2014	FORD EVEREST 2. 5L 10-S M/T		1	1
5.	Kendaraan dinas Bermotor lainnya	2014	Toyota Avanza Veloz M/T	5		
6.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	2014	Toyota Hilux Double Cabin		1	
7.	Mobil Ambulance	2015	FORD RANGER 2,2			1
8.	Mobil Jenazah	2015	GC415V APV DL X MT/Suzuki AVP	1		
9.	Mobil Ambulance	2015	Suzuki APV3 1.5 NEW LUX R17		1	
10.	Mobil Jenazah	2016	GC415V APV SD X MT/Suzuki AVP	1		
11.	Mobil Ambulance	2016	Inova	3		
12.	Kendaraan dinas Bermotor lainnya	2017	TOYOTA HILUX PICK UP 2.5L DSL MT	1		
13.	Mobil Jenazah	2017	DAIHATSU Luxio	1		
14.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat Pusling	2017	Toyota Hilux Double Cabin	2		
15.	Kendaraan bermotor Dinas lainnya	2021	Toyota Innova V	1		
16.	Mobil Ambulance	2021	TOYOTA/ HIACE COMMUTER (4X2) M/T /KD22M (RSUD AB)	1		
17.	Kendaraan bermotor Dinas lainnya	2022	Toyata All New Avanza Civiti	1		
18.	Mobil Ambulance	2022	Toyota Hilux 4x2 1.998 cc	1		
19.	Kendaraan Bermotor Penunmpang Lainnya	2022	Ambulance Deluxe VIP Toyota Hilux SC 4 x 2(RS AB)	1		
20	Kendaraan Bermotor Penunmpang Lainnya	2023	HIACE PREMIO (RS AB UTD)	1		
21.	Mobil Ambulance	2023	Toyota Hilux 4x2 M/T (DINKES)	2		
22.	Mobil Ambulance	2024	Toyota Hilux 2.4E DC 4x4 MT	3		
Total				26	3	5
II	Kendaraan Roda Dua			B	RR	RB
1	Sepeda Motor	2005	YAMAHA/FIZ-R 110			2
2	Sepeda Motor	2005	Yamaha / T 105 ERD			1
3	Sepeda Motor	2006	Honda / Supra 125		1	1
5	Sepeda Motor	2006	Honda / GLP III			1



No	Jenis Kendaraan	Tahun	Tipe/Merk Kendaraan	Jumlah		
6	Sepeda Motor	2009	Suzuki / Suzuki Shogun		1	
7	Sepeda Motor	2010	Suzuki Shogun 125 RR / SUZUKI FL 125 RCD	1	1	3
8	Sepeda Motor	2010	Yamaha Vixion / YAMAHA 3C1 (V-IXION/FZ150)		2	1
9	Sepeda Motor	2010	Suzuki / Shogun -1		4	1
10	Sepeda Motor	2010	Yamaha / Jupiter MX		2	3
11	Sepeda Motor	2011	YAMAHA / 55S (T135SEC)		4	1
12	Sepeda Motor	2013	HONDA / NEW VARIO TECHNO 125 FI CBS	3		2
13	Sepeda Motor	2014	NEW HONDA SUPRA X 125 / AFX12U21C08 M/T GFO	10	19	1
14	Sepeda Motor	2016	Honda Beat		2	1
15	Sepeda Motor	2016	yamaha / UELL (CAST WHEEL)	3		
16	Sepeda Motor	2019	Viar/Trail			8
17	Sepeda Motor	2019	yamaha / jupiter z cw f1 vin biru	7		
18	Sepeda Motor	2021	Yamaha / jupiter zcw-f1	5		
19	Sepeda Motor	2021	Yamaha Mio / M3 125/SPORTY	10		
20	Sepeda Motor	2022	YAMAHA / NEW GEAR	2		
21	Sepeda Motor	2022	yamaha / MIO M3 125	3		
22	Sepeda Motor	2023	Yamaha Gear / sporty	1		
23	Sepeda Motor	2023	Kawasaki / KLX 150 L	3		
24	Sepeda Motor	2024	Kawasaki / KLX 150 s	3		
25	Sepeda Motor	2024	YAMAHA GEAR / Sporty	3		
Total				54	36	26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Keterangan:

B = Baik

RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

Tabel II.5
Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap
di RSUD AKHMAD BERAHIM Tahun 2024

No.	Nama Ruangan	Kelas Perawatan					Jumlah TT	Keterangan
		VIP	I	II	III	Non Kelas		
1.	Mawar	-	-	-	6	-	6	Rawat Inap Persalinan
2.	Mawar Isolasi Persalinan	-	-	-	1	-	1	Rawat Inap Persalinan
3.	Perinatalogi	-	-	-	2	-	2	Rawat Inap Perinatologi
4.	Melati	-	4	-	-	-	4	Rawat Inap
5.	Dahlia	-	-	8	-	-	8	Rawat Inap
6.	Anggrek	-	-	-	29	-	29	Rawat Inap
7.	Anggrek Isolasi Dewasa	-	-	-	1	-	1	Rawat Inap Isolasi Dewasa
8.	Anggrek Isolasi Anak	-	-	-	2	-	2	Rawat Inap Isolasi Anak



No.	Nama Ruangan	Kelas Perawatan					Jumlah TT	Keterangan
		VIP	I	II	III	Non Kelas		
9.	Asoka	1	-	-	-	-	1	Rawat Inap VIP
10.	Tulip	-	-	-	-	4	4	ICU
11.	Ruang ICU	-	-	-	-	2	2	ICU Isolasi
JUMLAH							60	

Sumber : SK TT, RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tempat tidur ruang perawatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebanyak 60 unit tempat tidur.

Tabel II.6
Jumlah Alat Kesehatan
di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2024

NO	Nama Alat Kesehatan	Tahun Pengadaan						TOTAL	Ket
		2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Examination Bed	4						4	Baik
2	Pen Light / Lampu Senter	1						1	Baik
3	Stetoskop Dewasa	11						11	9 Baik 2 Rusak
4	Timbangan dewasa	6	1					7	Baik
5	Tensimeter Digital	12	2	1				15	1 Rusak 14 Baik
6	X-Ray Film Viewer	4	2					6	Baik
7	Baby Suction Pump	1						1	Baik
8	Nebulizer	3	1	1				5	Baik
9	Stetoskop bayi	0			1			1	Baik
10	Timbangan anak	0	1					1	Baik
11	Timbangan bayi	5						5	Baik
12	Tongue depressor	1						1	Baik
13	Cardiotocograph/CTG	0	1					1	Baik
14	Gynecology Bed	1						1	Baik
15	Fetal Doppler	6	4					10	9 Baik 1 Rusak
16	Minor Surgery Set	4						4	1 Rusak 3 Baik
17	USG 3D	2		1				3	Baik
18	USG 4D	0		1				1	Baik
19	Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	2	1	1			2	6	Baik
20	Autoklaf Kering	1						1	1 Rusak
21	Exodontia set	1						1	Baik
22	Dental hand instrument	1						1	Baik
23	Tromol Kasa / Kain Steril	1	1					2	Baik
24	Dental unit	1		1				2	Baik
25	Ultrasonic scaler	0	1					1	Baik
26	Mesin Anestesi	1						1	Baik
27	Mesin Anestesi ventilator	0		2				2	Baik
28	Electro couter bipolar	1						1	Baik



NO	Nama Alat Kesehatan	Tahun Pengadaan						TOTAL	Ket
		2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024		
29	Suction pump/Pompa vakum / Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	3		2				5	Baik
30	Lampu operasi (Ceyling Type)	1						1	Baik
31	Lampu Operasi Bergerak/Operating Lamp Mobile	1						1	Baik
32	Termometer digital	4	2					6	Baik
33	Kursi roda	6						6	Baik
34	Tensimeter Anaeroid	4	1					5	Baik
35	Pocket oximetry	0	2					2	Baik
36	Wheeled stretcher	4	3					7	Baik
37	Defibrillator	2		1		1		4	Baik
38	Infusion pump	1	2		4	1		8	Baik
39	Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	2	4					6	Baik
40	Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2				4		6	Baik
41	Resusitation Set / Resusitation bay / Resusitation kit	2						2	Baik
42	Syringe Pump	3	1	1	6	1		12	11 Baik 1 Rusak
43	Manual bed patient	17	8					25	Baik
44	Ophthalmoscope	0	1					1	Baik
45	Projection Vein Finder	0	1					1	Baik
46	Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	0	2	3				5	Baik
47	Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	1	6		2		10	Baik
48	Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	4						4	Baik
49	Tiang infus	7	5					12	Baik
50	Operating headlamp	2						2	Baik
51	Electric bed patient	4						4	Baik
52	Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator	1		1				2	Baik
53	Utility Trolley	1						1	Baik
54	Hecting set	1	4					5	Baik
55	Pinset Chirurgical	4						4	Baik



NO	Nama Alat Kesehatan	Tahun Pengadaan						TOTAL	Ket
		2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024		
56	Pispot	2						2	Baik
57	Waskom Cuci	1						1	Baik
58	Pediatric hospital bed	0	4					4	Baik
59	Stetoskop anak	2						2	1 Baik 1 Rusak
60	Tensimeter, Air Raksa	1						1	Rusak
61	Infant Warmer	1				1		2	Baik
62	Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	0		6				6	Baik
63	Operating table, electric	0		1	1			2	Baik
64	Sectio Caesarian set	0		1	1	1		3	Baik
65	Scrub Up Unit	0	1			1		2	Baik
66	ICU Bed Electric	0		6				6	Baik
67	Ventilator konvensional anak/dewasa	0		1				1	Baik
68	Antidecubitus Matras	0			4			4	Baik
69	Alat partus set	1	1					2	Baik
70	Curretage instrument set	1	1					2	Baik
71	Inkubator Bayi Transpor	1						1	Baik
72	Tempat Tidur Manual Untuk Persalinan	3						3	Baik
73	Tempat tidur bayi	0	6					6	Baik
74	Radiographic system, digital (DR)	1						1	
75	CR(Computed radiography)/Cine or spot fluorographic x-ray camera	0	1					1	Baik
76	Printer Processing Film / Paper	1						1	Baik
77	Pesawat Sinar-X, Stationer,Fixed Table x-ray system, general x-ray,Pesawat Rontgen	1						1	Rusak
78	X-Ray Mobile Digital	0	1					1	Baik
79	Radiologic table	0		1				1	Baik
80	Pesawat Sinar-X, Dental	0		1				1	Baik
81	Pesawat Sinar-X, Dental Panoramic	0		1				1	Baik
82	Shaking waterbath	0	1					1	Baik
83	Electrolyte Analyzer	0	1					1	Baik
84	Ultra Centrifuge	0	1					1	Baik
85	Automated Urine Analyzer	0	1					1	Baik
86	Mikroskop elektron	0	1					1	Baik
87	Automated hemoglobin system	2	1					3	Baik
88	Micropipet	29						29	Baik



NO	Nama Alat Kesehatan	Tahun Pengadaan						TOTAL	Ket
		2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024		
89	Microsedimentation centrifuge	1						1	Baik
90	Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	0				1		1	Baik
91	Preparation table	0					1	1	Baik
92	Blood bank refrigerator	0				2		2	Baik
93	Refrigerator reagensia	0				4		4	Baik
94	Blood bank centrifuge for in vitro diagnostic use	0				3		3	Baik
95	Mikroskop elektron	0				2		2	Baik
96	Plasma extractor	0				1		1	Baik
97	Blood and plasma warming device	0				1		1	Baik
98	Microbiological incubator	0				1		1	Baik
99	Automated cell-washing centrifuge for immuno-hematology	0				1		1	Baik
100	Cart/bed washer disinfecto	0		1				1	Baik
101	Drying cabinet	0		1				1	Baik
102	Gun spray	0		2				2	Baik
103	Trolley barang kotor	0		1				1	Baik
104	Steam sterilizer	0	1					1	Baik
105	Packing sealer	0		1				1	Baik
	TOTAL	195	74	46	17	28	3	363	

Sumber : RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa RSUD Akhmad Berahim memiliki alat-alat kesehatan yang sebagian besar dalam kondisi baik. Usia pakai alat-alat kesehatan tersebut juga terbilang masih baru, mengingat tahun pengadaan paling lama adalah tahun 2014 serta sebagian besar alat-alat kesehatannya diadakan pada tahun 2020. Namun demikian, RSUD Akhmad Berahim masih memerlukan banyak alat-alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan dalam upaya pemenuhan Akreditasi Rumah Sakit serta menaikkan kelas atau tipe Rumah Sakit dari D Pratama menjadi tipe C.

Tabel II.7
Data Ketersediaan Gedung/Ruangan
di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2024

No	Nama Gedung/Ruangan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	√	
2	Instalasi Rawat Jalan	√	
3	Gudang Farmasi	√	
4	Kebidanan (VK)	√	
5	Instalasi Rehabilitasi Medik	√	
6	Instalasi Hemodialisa	√	



No	Nama Gedung/Ruangan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak Ada
7	Instalasi Bedah Sentral (OK)	√	
8	Instalasi CSSD	√	
9	Ruang ICU	√	
10	Instalasi Radiologi	√	
11	Instalasi Laboratorium	√	
12	Instalasi Rawat Inap	√	
13	Instalasi Gizi	√	
14	Instalasi Laundry	√	
15	Instalasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR)		√
16	Instalasi Kesling dan K3	√	
17	Instalasi Pemulasaran Jenazah	√	
18	Instalasi Gas Medik	√	
19	Ruang Genset	√	
20	TPS Limbah B3	√	
21	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	√	

Sumber : RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan gedung atau ruangan di RSUD Akhmad Berahim masih terbatas dan kurang. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim saat ini masih dalam proses pembangunan Gedung dan ruangan untuk peningkatan dari Kelas D menjadi Kelas C.



Tabel II.8
Aset Tanah Dinas Kesehatan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (MP²)	Tahun Pengadaa n	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1.	Tanah Bangunan Rumah Golongan III Negara	800	1992	Jl. Tana abang/S.Riyadi (Yideng Pale)	Hak Pengelolaa n	6/29/1992	AB 266427	Bangunan staf medis rumah	Hibah	240.000	eks Bulungan inventarisasi/penilaian sesuai dengan BAST (Yideng pale)
2.	Tanah Bangunan Rumah Golongan III Negara	775	1992	Jl.tana abang (samping acacia) Yideng Pale	Hak Pengelolaa n	6/29/1992	AB 266428		Hibah	232.500	eks bulungan hasil penilaian/inventarisasi sesuai BAST
3.	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	1.430	1992	Jl.Tana abang/S.Riyadi	Hak Pengelolaa n	6/29/1992	AB 266426	Bangunan eks PKM Lama	Hibah	429.000	eks bulungan hasil penilaian/inventarisasi yang sesuai BAST
4.5	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	360	1993	Desa Bebatu Supa	Hak Pengelolaa n			Bangunan Bebatu Supa	Hibah	1.800	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
6.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600	1993	Desa Buong Baru	Hak Pengelolaa n			Bangunan Buong Baru	Hibah	1.470	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
7.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	1993	Desa Tengku Dacing	Hak Pengelolaa n			Bangunan Tengku Dacing	Hibah	364	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Tana Lia)
8.	Tanah Kaveling (dst)	375	2001	Sesayap Hilir	Hak Pengelolaa n			Bangunan Staf medis	Hibah	32.812.50	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir) - Tanah Bangunan staf medis puskesmas (eks. pustu)
9.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	7.000	2002	Sesayap Hilir	Hak Pengelolaa n			Bangunan Komplek PKM Sesayap Hilir	Hibah	612.500	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
10.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	7.000	2007	Tana Lia	Hak Pengelolaa n			Bangunan Komplek Puskesmas	Hibah	35.000	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Tana Lia)
11.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.250	2007	Sesayap sp3	Hak Pengelolaa n			Pustu	Hibah	12.500	Tanah Bangunan Pustu UPT SP3 Sesayap



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (MP)	Tahun Pengadaa n	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
12.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.250	2007	Desa Tana Merah	Hak Pengelolaa n			Pustu	Hibah	6.250	Tanah Bangunan Puskesmas pembantu UPT SP1 Tanah Merah
13.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	5.000	2010	Jl. Desa Kujau Rt.02 Kec.Sesayap	Hak Pengelolaa n		12/2007/SKPT/KDK/VI/2010	Pustu Kujau	Hibah	50.000	NO 02/2007/SH/KDK/VI/2010 P = 100 L = 50 P = 20 L = 20
14.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	2010	Jl. Desa Bebaru Supa Rt.04 Kec.Sesayap Hilir	Hak Pengelolaa n		01/RT/IV/BB/VIII/2010	Pustu Bebaru Supa	Hibah	2.000	
15.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600	2010	Jl. JEJABUL RT.02 DESA MANJELUTUN G SESAYAP KEC.	Hak Pengelolaa n		138.593.2/36/KEC-SH/PEMB/VII/2010	Pustu Manjeltung	Hibah	210	P = 30 L = 20
16.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.400	2010	Jl. UJANG MALA RT.01 DESA TENGGU DACING KEV. TANA LIA	Hak Pengelolaa n			Pustu Tengku Dacing	Hibah	2.184	P = 40 L = 60
17.	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	1.500	2011	Jl. Tideng Pale Kec. Sesayap	Hak Pengelolaa n		19/SPP/KD-SBW/III/2011	Pustu Sebwang		990	P = 50 L = 30. Pemilik Lahan Jambhari.i
18.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.500	2011	Jl. Linsayung Rt.02 Desa Seputuk Kec. Sesayap	Hak Pengelolaa n		34/SKPT/KDSP/IV/2011	Pustu Seputuk		15.000	legalisasi 593/017/SH/CMT- SSYP/IV/2011 P = 50 l = 30
19.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000	2011	Jl. Selamet Riadit Rt.01 Kec. Sesayap	Hak Pengelolaa n		21-2011/KDS-G/III/2011	Pustu Gunawan		10.000	Legalisasi 593/022/sh/cmt- ssyp/v/2011 P = 50 l = 40
20.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	5.000	2011	Jl. Poros Trans Kaltim Desa Kujau	Hak Pengelolaa n		593/SKPT/036/CMT- SSYP/2010	Puskesmas Kujau		326.471	Tanah Bangunan Lama Rp. 50.000.000 + Tanah bangunan Baru Rp. 50.000.000 + Perencanaan Tanah Urukun Rp. 14.850.000 + Pengawasan Tanah Urukun Rp. 11.841.00 + Fisik Urukun Rp. 199.780.000
21.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000	2011	Jl. Borneo Rt.01 Desa Buong 22.Baru Kec. Sesayap Hilir	Hak Pengelolaa n		021/SPPT/KDS-BB/III/2010	Pustu Buong Baru		3.400	NO 022/SH/IV/2011, LEGALISASI 138.593.2/13/KEC-SH/PEMB/III/2011

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-18



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (MP²)	Tahun Pengadaa n	Letak/Alamat	Status Tanah				Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat		Penggunaan				
						Tanggal	Nomor					
22.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.000	2011	Jl. Pemakaman Muslim Rt. 01 Tideng Pale Timur	Hak Pengelolaan	12/23/2011	94/KDTP/VIII/2984	Puskesmas Pale Timur		30.000	Legalisasi Camat/Rt : 87/A-14/VIII/1984. P = 100 L = 30 Pemilik lahan Rumstiah	
23.	Tanah Bangunan Rumah Sakti	60.00 0	2012	Desa Sebwang	Hak Pengelolaan	3/1/2012	02.PDT.G/2011/PN.TG.SLR	Rumah Sakti	Pembelian	1.148.519,02	Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakti	
24.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	450	2016	Jln. H. Ismail RT. 01 Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir. Kabupaten Tana Tidung	Hak Pengelolaan			Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Hibah	157.50	Surat Hibah Lokasi Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir. Kabupaten Tana Tidung	
25.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	600	2016	Jln. Jumbun RT. 002 Desa Sebwang. Kecamatan Sesayap	Hak Pengelolaan			Pembangunan Balai Penyuluh KB	Hibah	396	Ketersediaan Lokasi Pembangunan Penyuluh KB. Di Desa Sebwang. Kecamatan Sesayap	
26.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	930	2016	Jl. TEMANGGUNG RT II DESA BEBAKUNG	Hak Pengelolaan			PUSTU BEBAKUNG	Hibah	9.300	P = 31 L = 30	
27.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.500	2016	Jln Poros Kaltim Desa Sapari Kec. Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Sapari	Hibah	25.000	Surat Keterangan Hibah Melepaskan Hak atas Tanah Areal Pembangunan Pustu Di Desa Sapari	
28.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.200	2016	Jln. Desa Mendupo	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Mendupo	Hibah	12.000	Surat Hibah Pustu Mendupo	
29.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.500	2017	Jl. GANG SAMIT RT.001	Hak Pengelolaan			PUSTU BELAYAN ARI495	Hibah	25.000	P = 50 L = 50	
30.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	750	2017	Jln. Trans Sambungan	Hak Pengelolaan			Bangunan Puskesmas/Posyandu	Hibah	495	Surat Keterangan Tanah Pembangunan Pustu Sambungan (Pasum) Pasilitas Umum	
31.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.500	2018	Jn. Simpang Empat Poros Pemda, RT 02	Hak Pengelolaan			Puskesmas Muruk Rian	Hibah	15.000	Surat Hibah Lokasi Pembangunan Puskesmas di desa rian,kec Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung	
32.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	418	2018	Jln. Pelajar RT. 01 Desa	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Kapuak	Hibah	4.180	Surat Hibah Lokasi Pustu Di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian	

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-19



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (MP²)	Tahun Pengadaa n	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Kapuak. Kec. Muruk Rian							
33.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	.500	2018	Jln. Trans Sambungan	Hak Pengelolaan n			Pembangunan Pustu Sambungan Selatan	Hibah	990	Surat Keterangan Tanah Pembangunan Pustu Sambungan (Pasum) Fasilitas Umum
34.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.000	2019	l. Tarakan Jaya Desa Sambungan Kec. Tana Lia	Hak Pakai			bangun Penyuluh KB	Pembelia n	600	Tanah Bangunan balai Penyuluh KB di Desa Sambungan Kec. Tana Lia
35.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	20.00 0	2020	Jl. Trans Sambubngan Kec. Tana Lia	Hak Pengelolaan n			Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tana Lia	Hibah	13.200	Surat Hibah Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tana Lia di Kec. Tana Lia
36.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	300	2020	Jl. Aki asar/02. Desa Rian Kecamatan Muruk Rian	Hak Pengelolaan n			Pembangunan Balai Penyuluh KB	Hibah	3.000	Surat Hibah Tanah Pembangunan Balai Penyuluh KB Batas , U Tanah Desa, T Rumah Produksi KWT, S Tanah Desa Rian dan B Sekolah PAUD Mulia Desa Rian
37	Tanah bangunan Puskesmas /Posyandu	0,00	2022	Jl Poros RT II Desa Sengkong	Hak Pakai			Pembangunan Pustu Sengkong	Hibah	6.125,00	Tanah bangunan Pustu sengkong (Sulaiman)
38	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	300,00	2022	Jl. Pasar RT. 01. Desa Maring Kec. Betayau.	Hak Pakai			UntukPembuatan Balai Penyuluh KB	Hibah	3.000,00	Untuk PembuatanBalai Penyuluh KB

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024



Tabel II.9
Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Rumah Sakit lain-lain dst	Kurang Baik	135	Desa Bebatu		Tanah Milik Pemda	Hibah	75.060
2.	Bangunan Rumah Sakit lain-lain dst	Baik	128	Desa Sengkong		Tanah Milik Pemda	Hibah	435.450
3.	Bangunan Rumah Sakit lain-lain dst	Kurang Baik	84	Desa Buong Baru		Tanah Milik Pemda	Hibah	45.948
4.	Bangunan Rumah Sakit lain-lain dst	Baik	135	Desa Tengku Dacing		Tanah Milik Pemda	Hibah	81.960
5.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	40.61	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	20.832,93
6.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	200	Jln. Agis Pulak Kec. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	4.179.007,50
7.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	90	Jl. Tanah Abang Slamet Riyadi		Tanah Milik Pemda	Hibah	213.508,83
8.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	49,21	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	191.285,37
9.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	40.61	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	23.310,14
10.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1063,01	Jln. Printis KM 1 Kec. Sesayap (Bangunan Kantor kesehatan)		Tanah Milik Pemda	Hibah	6.213.936,77
11.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	200	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	4.082.177,20
12.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	72	Desa Tanah Merah		Tanah Milik Pemda	Hibah	121.003
13.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Sesayap SP3		Tanah Milik Pemda	Hibah	150.706
14.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	106,02	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	228.657,05
15.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	64	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	36.212
16.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Baik	77	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	57.951
17.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Baik	77	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	59.100
18.	Pagar Permanen	Baik		Tideng Pale		Tanah Milik Pemda	Pembelian	289.891,93
19.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Rian Kec. Muruk Rlan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	486.450,583



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
20.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Desa Kujau RT. 02 Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	385.044,13
21.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Desa badan bikis		Tanah Milik Pemda	Pembelian	374.556,46
22.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Jl. Tana Abang/ S.Riyadi (Tideng Pale) Lokasi PKM Tideng Pale		Tanah Milik Pemda	Pembelian	152.100
23.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. DESA BEBATU SUPA RT.04 KEC.SESAYAP HILIR		Tanah Milik Pemda	Pembelian	581.651,13
24.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. JEJABUL RT.02 DESA MANJELUTUNG KEC. SESAYAP		Tanah Milik Pemda	Pembelian	676.987,46
25.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. linseyung Rt. 02 Desa Seputuk Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	522.755,13
26.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Tideng Pale Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	473.631,13
27.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Selamat Riadi RT. 01 Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	469.776,13
28.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Poros Trans Kaltim Desa Kujau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.976.982
29.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Ujang Mala Rt. 01 Desa Tengku Dacing Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	794.503
30.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Borneo Rt. 01 Desa Buong Baru Kec Sesayap hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	490.752,63
31.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Jl. Tarakan Jaya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.959.493,50
32.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Ds. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	249.995,50
33.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Ds. Kujau Kec. Belayau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	230.735,50
34.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Jl.tana abang (samping acacia) Tideng Pale Bangunan Rumah Dinas Para medis		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.694.008,25
35.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Jl. Gereja		Tanah Milik Pemda	Pembelian	384.783,50
36.	Bangunan Tertutup Permanen	Baik		Jl. Pemakaman Muslim RT. 01 Tideng Pale Timur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.009.399,74
37.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Pemakaman Muslim Rt. 01 Tideng Pale Timu0072		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.328.937,64

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-22



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
38.	Rumah Golongan II Type D Permanen	Baik		Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	367.065,50
39.	Rumah Golongan II Type D Permanen	Baik		Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	368.505,50
40.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Simpang Empat Poros Penda KTY		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.553.516,47
41.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Rumah sakit Ahmad Berahim (Jln. Perintis KM 1 Kec. Sesayap)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	44.094.143,07
42.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Desa Trans Kujau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	428.285
43.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jln. Desa Bebakung		Tanah Milik Pemda	Pembelian	970.346
44.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jln. Desa Menjelutung Kec. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	609.086
45.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Desa mendupo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	991.424
46.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Baik		Desa Safari Kec. muruk Rian		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.081.013,80
47.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		Jl. Tideng Pale, Desa Sebwang, Kec Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	564.328,10
48.	Rumah Golongan III Type A Permanen	Baik		Jln. Tarakan Jaya Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.026.410
49.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Kujau Kec. Belayau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.163.843,44
50.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Ds. Belayan Ari Kec. Muruk Rian		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.037.110
51.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		jl. Desa bebatu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.131.136
52.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Desa Sambungan Selatan Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.208.234
53.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	37.499.196,51
54.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.339.788,51
55.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafaruddin.		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.078.551,25
56.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafarudin		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.453.551,25

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-23



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
57.	Bangunan Rumah Sakit lain-lain dst	Baik		Jl. Tarakan Jaya Kec tana lia desa Sambungan Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	443.088
58.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.492.534,85
59.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Kapuak, Sebelah Paud		Tanah Milik Pemda	Pembelian	431.586
60	Bangunan tempat tinggal Lainnya	Baik		Desa Muruk Rian		Tanah Milik Pemda	Pembelian	650.036,93
61	Bangunan Puskesmas Pembantu	Baik		Desa Sengkong		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.630.926,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024



2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif. Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil ditekan hingga 0 per 100.000 kelahiran hidup (0%), menunjukkan keberhasilan upaya promotif, preventif, dan kuratif di layanan dasar maupun rujukan. Prevalensi stunting turun menjadi 7,4 persen (capaian 134%) serta angka kesakitan hanya 9,43 persen (capaian 110%), keduanya melampaui target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82 persen (capaian 101,13%), mencerminkan adanya peningkatan mutu layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Namun demikian, Angka Kematian Bayi (AKB) masih berada pada 15 per 1.000 kelahiran hidup (capaian 67%), belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kasus kelainan bawaan, kehamilan risiko tinggi, serta keterlambatan akses pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan memperkuat layanan KIA melalui peningkatan kualitas ANC, *sweeping* ibu hamil, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan advokasi desa untuk pencegahan perkawinan usia dini.

Dari sisi anggaran, realisasi menunjukkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian indikator kinerja. Kendati masih terdapat tantangan pada penurunan AKB, secara keseluruhan kinerja pelayanan kesehatan tahun 2024 dapat dinilai baik dan tepat sasaran, serta memberikan landasan yang kuat untuk pencapaian target pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.

Tabel II.10
Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	125/100.000 KH	0/100.000 KH	0	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10/1.000 KH	15/1.000 KH	67 %	
		Angka Kesakitan	19,30	9,43	204,67 %	
		Prevalensi Stunting	14,9	7,4	201,35	
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	82,25	101,13 %	

a. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020-2024. Capaian kinerja Dinas Kesehatan juga dapat dilihat dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang



Kesehatan tahun 2020-2024. Berikut disajikan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Pencapaian SPM tahun 2020-2024.



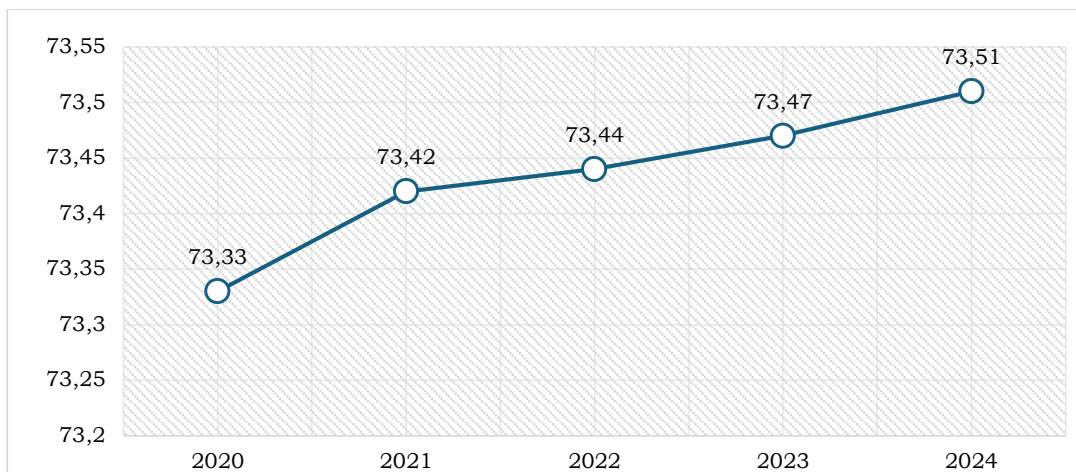
Tabel II.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup			306	346	334	143	125	195	420	206	216	0	157	82	162	66	0
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup			24	17	15	11	9	8	21	30	11	15	171	67	43	100	67
3	Angka Kesakitan	%			n/a	n/a	19,50	19,40	19,30	n/a	n/a	16,79	10,77	9,43	n/a	n/a	116,14	180,13	204,67
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			n/a	n/a	80,25	80,75	81,25	79,96	79,24	80,51	86,60	82,17	n/a	n/a	100,32	107,24	101,13
5	Prevalensi Stunting	%			n/a	20	18	15	14,5	n/a	12,04	30,7	15,1	7,4	n/a	87,72	58,63	99,34	201,35

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Gambar II.3
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



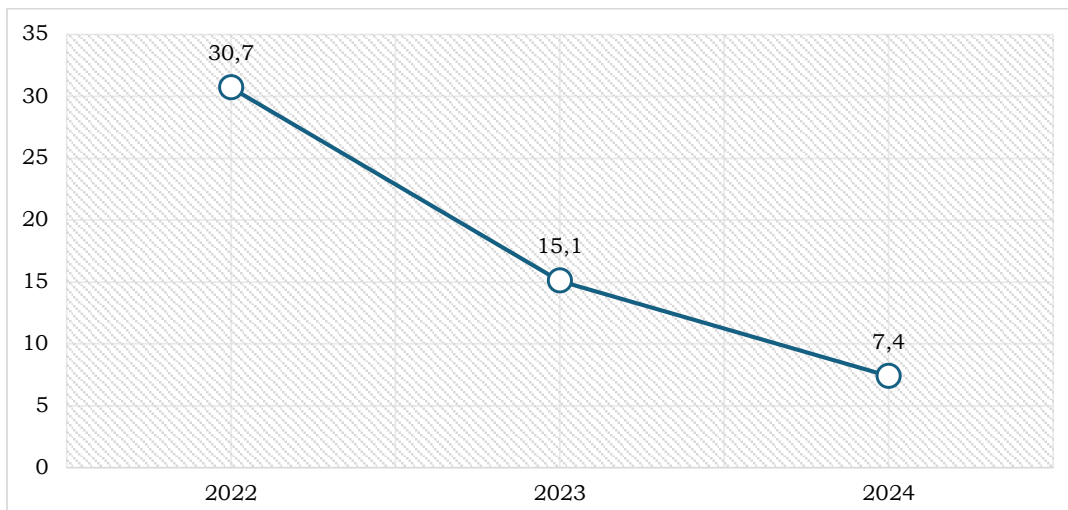
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 73,33 tahun. Angka ini terus mengalami kenaikan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil setiap tahunnya, mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan layanan kesehatan masyarakat. Tahun 2021, AHH naik menjadi 73,42 tahun, lalu meningkat menjadi 73,44 tahun pada 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 73,47 tahun dan mencapai 73,51 tahun pada 2024.

b) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting mengacu pada persentase atau jumlah keseluruhan kasus stunting (gangguan pertumbuhan fisik pada anak) yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Angka prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu daerah atau negara.

Gambar II.4
Prevalensi Stunting Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



Sumber : SKI/SSGI

Prevalensi stunting di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 30,7 persen, kemudian menurun tajam menjadi 15,1 persen pada tahun 2023. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan angka stunting mencapai 7,4 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program intervensi gizi, kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di daerah tersebut.

Selain indikator yang sudah tertera di atas, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa capaian indikator lain terkait kesehatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

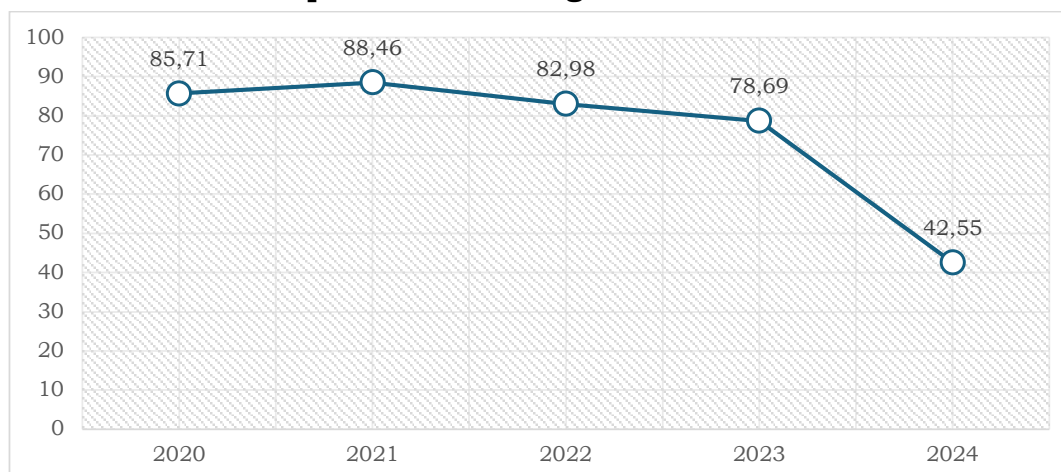
Tabel II.12
Uraian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	2,2	2,1	1,9	2,0	1,7
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	0	0	0	0	0
Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	83,1	103,4	97,39	90,94	95,25
Angka keberhasilan pengobatan TB	85,7	88,46	82,98	78,69	40,43
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,3	10,39	32,62	63,35	73,63
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	n/a	n/a	15,82	31,83	40,00

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Pada tahun 2024, indikator kinerja bidang kesehatan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan capaian yang beragam. Angka kelahiran total (TFR) berada pada level 1,7, sementara angka kematian ibu berhasil ditekan hingga 0 per 100.000 KH dan angka kematian balita tercatat sebesar 20 per 1.000 KH. Dari sisi pelayanan, cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis masih 0. Tingkat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup tinggi, yakni 95,29 persen, mencerminkan akses layanan kesehatan yang luas. Di sisi lain, angka keberhasilan pengobatan TB masih relatif rendah pada 40,43 persen, sementara proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup tercatat 40 persen, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendorong gaya hidup sehat di masyarakat.

Gambar II.5
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (TB) di Kabupaten Tana Tidung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang naik dan turun dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tingkat keberhasilan tercatat sebesar 85,71 persen dan meningkat menjadi 88,46 persen di tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2024, di mana angka keberhasilan pengobatan TB semakin turun hingga hanya mencapai 42,55 persen. Prosedur perhitungan pengobatan TB dilakukan selama 6 bulan dengan intensif pengawasan, sedangkan evaluasinya dilakukan 6 bulan kemudian. Titik poin keberhasilan, apabila setelah di evaluasi selama 6 bulan, tidak ditemukan tanda-tanda TB. Namun apabila dalam evaluasi masih ditemukan TB, maka pengobatan harus diulang kembali. Penurunan signifikan ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam upaya pengendalian TB di Kabupaten Tana Tidung yang perlu segera mendapatkan perhatian dan intervensi lebih intensif.



Tabel II.13
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Melahirkan	Kematian Ibu Nifas	Total Kematian Ibu
2020	1	0	0	1
2021	1	0	1	2
2022	1	0	0	1
2023	0	0	1	1
2024	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Tabel II.14
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan balita di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Kematian Neonatal (0-28 hari)	Kematian Bayi (0-11 bulan)	Kematian Anak Balita (12-59 bulan)	Total Kematian Balita (0-59 bulan)
2020	3	3	1	4
2021	5	10	0	10
2022	11	15	0	15
2023	4	5	2	7
2024	3	6	2	8

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Berdasarkan data jumlah kematian ibu, bayi, dan balita di Kabupaten Tana Tidung periode 2020–2024, terlihat bahwa angka kematian ibu relatif rendah dengan kisaran 0–2 kasus per tahun dan bahkan tidak tercatat pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi dan balita cenderung fluktuatif dengan puncak tertinggi pada tahun 2022, yaitu 15 kasus balita (0–59 bulan) dan 15 kasus bayi (0–11 bulan). Setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 7 kasus balita dan 5 kasus bayi, meskipun sedikit meningkat kembali pada 2024 dengan 8 kasus balita dan 6 kasus bayi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kematian ibu berhasil ditekan hingga nol, angka kematian bayi dan balita masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel II.15
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL) di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Puskesmas	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Tideng Pale	235	158	67,2	252	126	50	222	204	91,9	222	121	54,5	232	117	50,4
Sesayap Hilir	161	161	100	174	203	116,7	148	253	170,9	148	185	125	151	128	84,8
Tana Lia	82	40	48,8	87	41	47,1	67	58	86,6	67	64	95,5	68	65	95,6
Kujau	64	33	51,6	69	22	30,4	64	45	70,3	64	3	4,7	69	15	21,7
Muruk Rian	41	18	43,9	43	21	48,8	35	23	65,7	35	28	80	36	22	61,1
Total	583	410	70,3	625	412	65,9	536	583	108,8	536	429	80	556	347	62,4

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL) di Kabupaten Tana Tidung pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang naik dan turun antar tahun



maupun antar puskesmas. Pada tahun 2020, capaian total mencapai 70,3 persen dengan jumlah bayi terimunisasi sebanyak 410, kemudian menurun pada 2021 menjadi 65,9 persen (412 bayi). Tahun 2022 mencatat capaian tertinggi sebesar 108,8 persen dengan 583 bayi, namun kembali menurun pada 2024 menjadi 62,4 persen (347 bayi). Secara per puskesmas, capaian tertinggi terlihat di Puskesmas Sesayap Hilir pada 2021–2023, peningkatan angka ini disebabkan puskesmas Sesayap Hilir yang melakukan imunisasi dengan metode jemput bola dengan mendatangi perusahaan. Sedangkan puskesmas lain seperti Tana Lia dan Kujau menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, berbeda dengan Tideng Pale dan Muruk Rian yang cenderung berfluktuasi dan berada di bawah 70 persen pada sebagian besar tahun. Hal ini disebabkan adanya pengguna imunisasi di tahun sebelumnya lebih memilih melanjutkan ke dokter dikarenakan efek samping imunisasi. Selain itu data pembagi realisasi peserta IDL memiliki perbedaan antara data di Pusdatin dengan realita di lapangan. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL) menggambarkan bahwa meskipun ada pencapaian yang baik di beberapa wilayah, masih dibutuhkan upaya lebih kuat untuk menjaga pemerataan dan konsistensi cakupan imunisasi di seluruh puskesmas.

b. Anggaran Pendanaan Dinas Kesehatan

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II.16
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Penyerapan Anggaran (%)
1.	2020	96.336.829.988,07	81.233.015.994,00	84,32
2	2021	138.796.367.352,00	103.970.786.772,00	74,91
3.	2022	127.545.085.870,00	108.947.149.677,00	85,42
4.	2023	164.095.301.954,00	134.315.236.387,00	81,85
5.	2024	147.171.464.053,00	131.497.694.694,00	89,34

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik dari sisi pagu maupun realisasi. Sumber anggaran berasal dari APBD II Kabupaten Tana Tidung dan APBN yang mencakup DAK Fisik bidang Kesehatan, DAK Non Fisik bidang Kesehatan, DAK Fisik bidang Keluarga Berencana, serta DAK Non Fisik bidang Keluarga Berencana. Selain itu, anggaran kesehatan juga diperkuat dengan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dialokasikan untuk mendukung operasional Puskesmas dan RSUD Akhmad Berahim.

Pada tahun 2020, pagu anggaran tercatat sebesar Rp. 96,33 miliar dengan realisasi Rp. 81,23 miliar atau 84,32 persen. Alokasi ini terutama difokuskan pada pembangunan Rumah Sakit Pratama Tana Lia senilai Rp. 42,75 miliar,

pengadaan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 sebesar Rp. 11,16 miliar. Tahun 2021, pagu anggaran meningkat menjadi Rp. 138,79 miliar dengan realisasi Rp. 103,97 miliar atau 74,91 persen. Persentase penyerapan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi sehingga sejumlah kegiatan reguler tertunda. Tahun 2022, pagu anggaran menurun menjadi Rp. 127,54 miliar dengan realisasi Rp. 108,94 miliar atau 85,42 persen. Kinerja penyerapan meningkat, dengan fokus pada penguatan layanan dasar kesehatan dan penyediaan sarana prasarana.

Selanjutnya pada tahun 2023, pagu anggaran kembali meningkat menjadi Rp. 164,09 miliar dengan realisasi Rp. 134,31 miliar atau 81,85 persen. Nominal realisasi ini merupakan yang terbesar selama periode lima tahun terakhir, dengan prioritas pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, pembangunan sarana kesehatan, serta penguatan layanan rujukan di RSUD. Pada tahun 2024, pagu anggaran menurun menjadi Rp. 147,17 miliar dengan realisasi Rp. 131,49 miliar atau 89,34 persen. Rasio penyerapan ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencerminkan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Fokus penggunaan diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar kesehatan, percepatan penurunan stunting, pelaksanaan safari gizi, serta penguatan kapasitas RSUD dan Puskesmas.

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 berada di atas 80 persen, yang menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Meskipun terdapat dinamika pada besaran pagu, tren peningkatan penyerapan khususnya pada tahun 2024 menjadi indikator positif bahwa pengelolaan anggaran semakin baik dan tepat sasaran, meskipun tantangan tetap ada pada sektor layanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan sarana prasarana di wilayah perbatasan. Rincian penyerapan anggaran per program Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017-2020 disajikan pada tabel di bawah ini



Tabel II. 17
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Penyerapan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.143.288.389,40	NA	NA	NA	NA	5.435.329.548,00	NA	NA	NA	NA	88,48	NA	NA	NA	NA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.887.576.000,00	NA	NA	NA	NA	1.600.155.382,00	NA	NA	NA	NA	84,77	NA	NA	NA	NA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	33.250.000,00	NA	NA	NA	NA	4.986.500,00	NA	NA	NA	NA	15,00	NA	NA	NA	NA
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
4	Program Obat dan Perbekalan	3.117.495.000,00	NA	NA	NA	NA	1.624.752.416,00	NA	NA	NA	NA	50,50	NA	NA	NA	NA
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.335.471.968,00	NA	NA	NA	NA	4.546.449.389,00	NA	NA	NA	NA	71,76	NA	NA	NA	NA
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	106.414.000,00	NA	NA	NA	NA	85.755.976,00	NA	NA	NA	NA	80,59	NA	NA	NA	NA
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	89.140.000,00	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	314.428.000,00	NA	NA	NA	NA	167.900.000,00	NA	NA	NA	NA	53,40	NA	NA	NA	NA



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No	Program	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Penyerapan Anggaran						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Program Pencegahan dan penganggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	706.211.628,00	NA	NA	NA	NA	561.182.444,00	NA	NA	NA	NA	79,46	NA	NA	NA	NA
10	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	500.125.000,00	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
11	Program Pengadaan, Peningkatan, sarana dan Prasarana Puskesmas/ PKM Pembantu dan jaringannya	834.000.000,00	NA	NA	NA	NA	424.939.401,00	NA	NA	NA	NA	50,95	NA	NA	NA	NA
12	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit(RS)/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	70.830.765.502,67	NA	NA	NA	NA	62.116.994.391,00	NA	NA	NA	NA	87,70	NA	NA	NA	NA
13	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit(RS)/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	516.850.000,00	NA	NA	NA	NA	411.196.251,00	NA	NA	NA	NA	79,56	NA	NA	NA	NA
14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.800.919.000,00	NA	NA	NA	NA	2.754.440.500,00	NA	NA	NA	NA	98,34	NA	NA	NA	NA
15	Program Peningkatan Kesmatan Ibu Melahirkan dan Anak	78.580.400,00	NA	NA	NA	NA	125.440.000,00	NA	NA	NA	NA	158,82	NA	NA	NA	NA
16	Program Keluarga Berencana	1.886.474.000,00	NA	NA	NA	NA	1.373.503.786,00	NA	NA	NA	NA	73,59	NA	NA	NA	NA
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	61.566.327.231,00	57.615.110.946	71.033.794.473,00	81.544.908.801,00	NA	52.838.955.629,00	51.560.148.449,00	59.535.011.503,00	77.161.234.574,00	NA	85,82	89,49	83,80	94,62
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NA	70.105.359.633,00	62.702.217.432	88.694.517.141,00	57.865.889.667,00	NA	45.840.186.595,00	53.804.784.637,13	66.192.776.148,00	478.439.879,8	NA	65,39	85,81	74,63	82,68

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-35



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No	Program	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Penyerapan Anggaran						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	NA	70.105.359.633,00	62.702.217.432	88.694.517.141,00	57.865.889.667,00	NA	45.840.186.595,00	53.804.784.637,13	66.192.776.148,00	47.843.987.978	NA	65,39	85,81	74,63	82,68
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	NA	4.414.765.448,00	3.830.022.592	69.286.336.833,00	4.138.277.925,00	NA	3.496.157.501,00	2.368.733.437,00	58.023.907.314,00	32.199.843.24	NA	79,19	61,85	83,75	77,81
20	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	NA	170.295.000,00	10.405.280,00	392.099.030,00	48.616.000,00	NA	45.583.400,00	71.580.000,00	155.660.580,00	38.197.000	NA	26,77	687,92	39,70	78,57
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	NA	135.678.000,00	1.607.783,000	801.610.233,00	413.461.400,00	NA	61.484.300,00	1.223.253.000,00	546.345.726,00	319.689.000	NA	45,32	76,08	68,16	77,32
22	PROGRAM PENGENDALAN PENDUDUK	NA	NA	118.115,000	216.600.000,00	297.259.800,00	NA	NA	86.048.000,00	171.000.000,00	173.008.000	NA	NA	72,85	78,95	58,20
23	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	NA	2.302.942.040,00	1.150.204.100	1.011.131.440,00	2.126.046.360,00	NA	1.643.389.347,00	661.245.132,00	733.246.156,00	18.726.909	NA	71,36	57,49	72,52	87,97
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	NA	101.000.000,00	417.580,000	1.945.549.653,00	737.004.100,00	NA	45.030.000,00	331.160.000,00	1.431.607.794,00	707.67100	NA	44,58	79,30	73,58	95,22

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

2.1.4 Inovasi dan Penghargaan

a. Inovasi

1) Rumah Sakit Masuk Desa (Rusa Muda)

Rusa Muda merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang digagas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menjawab tantangan geografis wilayah perbatasan, pesisir, dan desa yang sulit mengakses pelayanan kesehatan, terutama layanan spesialis. Melalui program ini, tenaga dokter spesialis dan tim kesehatan diturunkan langsung ke desa untuk memberikan pelayanan terpadu, meliputi pemeriksaan penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kesehatan anak, gigi, skrining penyakit tidak menular, pelayanan KB, tindakan dasar medis, serta edukasi pencegahan stunting.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2022, RUSA MUDA telah menjangkau 24 desa di 5 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 7.200 orang. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan sekaligus menurunkan berbagai indikator masalah kesehatan. Prevalensi stunting berhasil ditekan dari 30,7% pada 2022 menjadi 7,4% pada 2024; angka kematian ibu menurun hingga 0 per 100.000 kelahiran hidup; serta angka kesakitan masyarakat turun dari 16,79% menjadi 9,43% pada periode yang sama.

Keberhasilan RUSA MUDA juga mendapat apresiasi eksternal, salah satunya penghargaan sebagai Inovasi Terbaik I tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menjamin keberlanjutan, inovasi ini telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa.

Dengan berbagai capaian tersebut, RUSA MUDA tidak hanya menjadi solusi nyata bagi masyarakat desa dan perbatasan di Kabupaten Tana Tidung, tetapi juga berpotensi sebagai model inovasi kesehatan yang dapat direplikasi di daerah lain. Ke depan, program ini akan terus dilanjutkan dan diperkuat sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

2) Sistem Informasi Pengendalian Status Gizi dan Pemetaan Stunting (Si Paling Penting)

Si Paling Penting merupakan inovasi digital Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang dikembangkan untuk memperkuat upaya penanggulangan stunting melalui pemantauan gizi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan data gizi yang valid dan real-time, mengingat stunting masih menjadi isu strategis kesehatan masyarakat di daerah.

Melalui aplikasi Si Paling Penting, data status gizi balita dapat diinput langsung oleh tenaga kesehatan di Puskesmas maupun kader Posyandu. Data tersebut secara otomatis terintegrasi ke Dinas Kesehatan, sehingga memudahkan proses pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan. Salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini adalah peta digital per desa, yang



menampilkan kondisi stunting di setiap wilayah. Dengan fitur ini, desa dengan prevalensi tinggi dapat segera teridentifikasi dan dijadikan prioritas intervensi.

Implementasi sejak tahun 2023 telah menunjukkan hasil nyata, antara lain meningkatnya akurasi data stunting, mempercepat deteksi dini anak berisiko, serta memudahkan perencanaan intervensi gizi terpadu. Hal ini turut mendukung capaian penurunan prevalensi stunting Kabupaten Tana Tidung dari 30,7% pada tahun 2022 menjadi 7,4% pada tahun 2024, salah satu capaian terbaik di Provinsi Kalimantan Utara.

Selain mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, Si Paling Penting juga sejalan dengan transformasi digital di bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Satu Sehat Kemenkes RI. Ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan, termasuk integrasi dengan aplikasi kesehatan lain, agar berfungsi optimal sebagai basis data gizi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan hadirnya Si Paling Penting, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak hanya memperkuat tata kelola data kesehatan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif yang mampu mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.

b. Penghargaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung berhasil meraih sejumlah penghargaan yang mencerminkan pengakuan atas kinerja pelayanan kesehatan. Prestasi ini menjadi bukti bahwa berbagai upaya yang dilaksanakan telah berjalan efektif, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Beberapa penghargaan penting yang diperoleh antara lain :

Tabel II.18
Penghargaan Tingkat Nasional
Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi	Keterangan
1	2020	Sertifikat Eliminasi Malaria	Kementerian Kesehatan RI	Menghentikan sama sekali penularan malaria di suatu wilayah hingga tidak ditemukan lagi kasus malaria yang ditularkan secara setempat (indigenous case)
2	2022	Keberhasilan mencapai Discarded Case (Bukan Campak – Bukan Rubella) Rate $\geq 2/100.000$	Kementerian Kesehatan RI	Menunjukkan sistem surveilans penyakit menular sensitif sesuai standar WHO
3	2022	Keberhasilan mencapai Non-Polio AFP (NPAPF) Rate $\geq 2/100.000$ Penduduk <15 Tahun	Kementerian Kesehatan RI	Bukti sensitivitas surveilans polio dan deteksi dini KLB
4	2023	Capaian Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama	Kementerian Kesehatan RI	Puskesmas Tideng Pale, Puskesmas Sesayap Hilir, Puskesmas Tana Lia, Puskesmas Kujau, dan



No.	Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi	Keterangan
				Puskesmas Muruk Rian
5	2023	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	Kementerian Kesehatan RI	RSUD Akhmad Berahim
6	2023	Sertifikat Bebas Frambusia	Kementerian Kesehatan RI	Eliminasi penyakit frambusia di Kabupaten Tana Tidung
7	2023	Pastika Parahita	Kementerian Kesehatan RI	Kawasan Tanpa Rokok
8	2023	Penghargaan Capaian Indikator Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging dan Dokumen Rekomendasi	Kementerian Kesehatan RI	Pengendalian Penyakit Menular
9	2023	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023	Kementerian Kesehatan RI	Kepesertaan JKN >95% penduduk Kabupaten Tana Tidung
10	2024	Penghargaan Program Kesehatan Jiwa – Pencapaian Target Terbaik ke-3 se-Indonesia	Kementerian Kesehatan RI	Apresiasi atas kinerja kesehatan jiwa daerah
11	2024	Penghargaan dengan kategori Utama Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024	Kementerian Kesehatan RI	Kepesertaan JKN >95% penduduk Kabupaten Tana Tidung
12	2024	Capaian Akreditasi Rumah Sakit D Pratama dengan Kategori Paripurna	Kementerian Kesehatan RI	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Kramat Tana Lia

Tabel II.19
Penghargaan Tingkat Provinsi
Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi	Keterangan
1	2022	Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi	Gubernur Kalimantan Utara	Apresiasi atas kiprah perempuan di bidang kesehatan & pemberdayaan sosial
2	2022	Juara I Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Kaltara (Posyandu Kirana – Sesayap Hilir)	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Prestasi kader kesehatan masyarakat dalam pelayanan lansia
3	2023	Juara 1 Lomba POS UKK Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (POS UKK Batu Bata Sesayap Selor)	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Prestasi Kader kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan kepada kelompok pekerja
4	2023	Terbaik I Kabupaten/Kota dengan Capaian Deteksi Dini Tertinggi (%)	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Penghargaan atas capaian deteksi dini kesehatan masyarakat tertinggi
5	2024	Inovasi Terbaik I Provinsi	Gubernur	Akses pelayanan kesehatan



No.	Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi	Keterangan
		Kalimantan Utara melalui program RUSA MUDA	Kalimantan Utara	spesialistik ke Desa-Desa
6	2024	Posyandu Busak Odou Juara I Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltara	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Prestasi kader dan posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar
7	2024	Duta GenRe Juara I Tingkat Provinsi Kaltara	BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Prestasi remaja Tana Tidung dalam program Generasi Berencana
8	2024	Juara 1 Lomba POS UKK Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (POS UKK Anggrek Mandiri, Desa Gunawan)	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Prestasi Kader kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan kepada kelompok pekerja
9	2024	Penghargaan Terbaik III Pelaksana DAK Non Fisik BOKB dengan Penyerapan Tertinggi	Gubernur Kalimantan Utara	Capaian optimalisasi anggaran operasional KB
10	2024	Apresiasi Terbaik I Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Stunting Terendah Tahun 2024	Gubernur Kalimantan Utara	Bukti komitmen Tana Tidung dalam percepatan penurunan stunting
11	2024	Terbaik 1 Atas Kinerja Capaian Penginputan Hasil Deteksi PTM Melalui SIPTM-ASIK Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Capaian Penginputan Hasil Deteksi PTM Melalui SIPTM-ASIK Tahun 2024
12	2025	Posyandu Teratai Juara I Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltara	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara	Prestasi kader dan posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah merupakan pihak-pihak atau segmen masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran ini dapat berupa individu, rumah tangga, komunitas, organisasi masyarakat, maupun lembaga publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani oleh perangkat daerah. Adapun kelompok masyarakat yang merupakan sasaran layanan bagi Dinas Kesehatan adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kesehatan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas

Kesehatan telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan, setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kesehatan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas dan akses layanan kesehatan antar wilayah
2. Belum optimalnya capaian keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular
4. Belum optimalnya persebaran dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, permasalahan pembangunan Dinas Kesehatan dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kualitas dan akses layanan kesehatan antar wilayah

Akses dan kualitas layanan kesehatan masih menghadapi kendala akibat kondisi geografis wilayah yang luas dan tersebar. Masyarakat di daerah tertentu harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh layanan medis, sehingga ada perbedaan kemudahan akses antar wilayah. Hal ini tentu memengaruhi kecepatan masyarakat mendapatkan pelayanan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan tingkat dasar maupun rujukan belum sepenuhnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana medis yang memadai. Ketersediaan transportasi dan infrastruktur kesehatan yang berbeda antar wilayah turut memengaruhi kualitas layanan. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat belum merata, sehingga perlu upaya penguatan agar kualitas layanan lebih setara di seluruh wilayah.

2. Belum optimalnya capaian keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Penerapan pola hidup bersih dan sehat oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Beberapa rumah tangga belum sepenuhnya membiasakan diri dengan praktik sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan bergizi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian indikator keluarga sehat yang masih belum maksimal.

Selain faktor pemahaman, ketersediaan sarana pendukung seperti sanitasi dan air bersih juga memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Nilai-nilai budaya serta kebiasaan tradisional yang masih dijalankan juga kadang membuat perubahan perilaku berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, perlu upaya berkesinambungan melalui edukasi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat agar keluarga sehat dan PHBS dapat lebih terwujud secara menyeluruh.

3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular

Penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan penyakit berbasis lingkungan masih ditemukan di tengah masyarakat, sementara pada saat yang sama penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung juga menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan beban ganda penyakit yang dihadapi layanan kesehatan.

Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain pola hidup, lingkungan, serta keterbatasan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Program promotif dan preventif sudah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar deteksi dini lebih optimal. Dengan langkah tersebut, prevalensi penyakit dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

4. Belum optimalnya persebaran dan kualitas tenaga medis dan tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan masih cenderung lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pusat pelayanan, sementara daerah yang lebih jauh atau sulit dijangkau relatif lebih terbatas. Hal ini berdampak pada perbedaan kualitas layanan yang diterima masyarakat antar wilayah.

Selain distribusi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan juga masih menjadi kebutuhan penting, terutama dalam penguasaan teknologi medis dan pelayanan spesialis. Dukungan berupa pelatihan, insentif, serta fasilitas kerja yang memadai akan mendorong peningkatan motivasi dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, layanan kesehatan dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

2.2.2 Telaah Isu Strategis

a. Telaah Isu Global

Perkembangan Industri 5.0 secara global menekankan pentingnya kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan individu. Meskipun transformasi digital menjadi ciri utama dari era ini, esensi dari Industri 5.0 juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Bagi Kabupaten Tana Tidung, yang masih menghadapi tantangan dalam pembangunan manusia dan akses pelayanan dasar, pendekatan ini membuka peluang untuk memperkuat sistem kesehatan melalui cara-cara yang kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dapat mengambil bagian dalam agenda global ini melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar yang berorientasi pada masyarakat dan wilayah. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan layanan yang menjangkau daerah terpencil melalui pendekatan berbasis komunitas, serta kolaborasi dengan sektor lain dalam pemanfaatan potensi lokal seperti tanaman obat tradisional, menjadi bentuk adaptasi yang sejalan dengan semangat Industri 5.0. Meskipun pemanfaatan

teknologi canggih belum dapat diimplementasikan secara luas, fokus pada pelayanan yang humanis, tanggap kebutuhan lokal, dan inklusif menjadi kontribusi nyata Tana Tidung dalam merespons arah transformasi global menuju sistem pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Telaahan Isu Nasional

Secara nasional, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan modal manusia menjadi salah satu isu strategis utama dalam pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini karena daya saing suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas manusia yang sehat, terampil, dan berpendidikan. Bonus demografi yang sedang dan akan terus berlangsung dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi apabila didukung dengan SDM yang produktif. Namun sebaliknya, jika kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk rendah, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban pembangunan.

Dalam konteks daerah, pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,52 persen pada tahun 2024 menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan modal produktif masyarakat. Penduduk yang sehat dan berdaya akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, jasa, maupun industri. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kualitas modal manusia.

Modal manusia bukan hanya sekadar jumlah penduduk, tetapi juga meliputi kualitas kesehatan, keterampilan, dan kapasitas produktif yang dimiliki masyarakat. Tantangan kesehatan seperti kesenjangan layanan antar wilayah, rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular dapat memengaruhi kualitas modal manusia di daerah. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi menghambat produktivitas masyarakat, padahal potensi penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan pembangunan.

Selain itu, tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan juga menjadi bagian integral dalam pembangunan modal manusia. Ketersediaan tenaga medis yang berkualitas dan merata merupakan syarat utama agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik. Namun distribusi dan kapasitas tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Dengan memperkuat kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, maka upaya pembangunan SDM dan modal manusia akan lebih optimal serta mampu mendukung tercapainya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

c. Telaah Isu Regional

Di tingkat regional, isu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kohesivitas sosial menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Daerah-daerah di kawasan perbatasan dan kepulauan menghadapi tantangan ganda, yakni bagaimana memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik sekaligus menjaga solidaritas sosial di tengah

keberagaman budaya, kondisi geografis, dan keterbatasan infrastruktur. Penguatan SDM yang sehat, terdidik, dan produktif akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sementara kohesivitas sosial memastikan pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kesehatan, peningkatan kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,52 persen pada tahun 2024 dapat menjadi potensi besar apabila diiringi dengan kondisi kesehatan masyarakat yang prima. Namun, tantangan seperti rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular, dapat menghambat produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk mendukung lahirnya SDM yang sehat dan siap bersaing di era regional yang semakin kompetitif.

Kohesivitas sosial juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kesehatan. Solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan bersama, seperti keterlibatan dalam program posyandu, gerakan PHBS, maupun kegiatan gotong royong sanitasi lingkungan, menjadi modal sosial yang penting. Tanpa dukungan komunitas, program promotif dan preventif sulit berjalan optimal. Dengan memperkuat kohesivitas sosial, upaya menjaga kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

Bagi Dinas Kesehatan, isu penguatan kualitas SDM dan kohesivitas sosial berarti mendorong strategi yang tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan kombinasi antara peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemerataan akses layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat, daerah akan mampu membangun SDM yang sehat sekaligus menjaga kohesivitas sosial sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan.

d. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan langkah penting bagi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, untuk menyusun arah kebijakan dan program yang selaras dengan agenda pembangunan daerah. Visi dan misi tidak hanya menjadi pernyataan politik pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman teknokratis dalam mengarahkan kegiatan sektoral agar terintegrasi menuju tujuan bersama. Dengan memahami visi dan misi, perangkat daerah dapat lebih fokus dalam menentukan prioritas kerja, menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan kontribusi nyata dalam pencapaian pembangunan daerah.

Visi *“Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera”* menekankan pembangunan manusia yang berkualitas, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan daya saing daerah. Bagi Dinas Kesehatan, hal ini bermakna bahwa kesehatan masyarakat harus dipastikan secara merata agar setiap penduduk memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat sebagai dasar partisipasi aktif dalam pembangunan. Derajat kesehatan yang tinggi juga akan menjadi modal

utama untuk mencetak generasi yang berdaya saing dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Misi pertama, yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”*, berkaitan erat dengan tugas Dinas Kesehatan. Kualitas SDM tidak dapat terlepas dari kesehatan masyarakat sebagai fondasi utamanya. Pertumbuhan penduduk sebesar 2,52 persen pada tahun 2024 menjadi peluang besar untuk memperkuat modal manusia produktif, namun peluang ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat sejak dini, pemerataan layanan, penguatan promotif dan preventif, serta penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Dengan demikian, peran Dinas Kesehatan langsung mendukung pencapaian misi ini melalui upaya sistematis dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Selain itu, misi tersebut juga dipertegas melalui **Program Tana Tidung Unggul**, yang memuat agenda peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan olahraga, serta didukung pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar. Bagi sektor kesehatan, program ini membuka ruang untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas tenaga medis, membangun sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai, serta memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil. Dengan dukungan program ini, Dinas Kesehatan dapat berperan strategis dalam menjadikan masyarakat lebih sehat, produktif, dan unggul, sehingga mendukung terwujudnya Tana Tidung yang berdaya saing, adil, dan sejahtera.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025–2029, isu Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Masyarakat yang tercantum dalam KLHS menjadi salah satu aspek strategis yang perlu ditelaah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya layanan kesehatan, merupakan fondasi dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Tantangan yang masih dihadapi antara lain keterjangkauan layanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis, sarana prasarana yang belum merata, serta perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penanganan isu ini penting untuk memastikan pembangunan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Dalam kerangka KLHS, isu layanan kesehatan masyarakat juga berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan daya dukung ekosistem. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti keterbatasan sanitasi, pencemaran air, maupun risiko penyakit berbasis lingkungan, dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu memandang aspek kesehatan tidak hanya sebatas pelayanan medis, tetapi juga terkait erat dengan kualitas lingkungan hidup. Upaya peningkatan layanan kesehatan harus berjalan seiring dengan perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan sangat relevan dengan agenda pembangunan berkeadilan dan pengurangan

kesenjangan. Masih terdapat kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah terpencil yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Peran Dinas Kesehatan melalui program inklusif, seperti peningkatan cakupan jaminan kesehatan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan stunting, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan kesehatan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan isu layanan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya menekankan pada peningkatan sarana prasarana, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses, serta penguatan sinergi lintas sektor. Pendekatan yang holistik ini akan memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan sekaligus mendukung terwujudnya visi daerah “Tana Tidung Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera.”

2.2.3 Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kesehatan, serta telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tana Tidung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka isu-isu strategis pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Akselerasi Pemerataan Layanan Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung

Pemerataan layanan kesehatan menjadi isu strategis mengingat karakteristik wilayah yang tersebar serta masih adanya perbedaan akses antar kecamatan. Fasilitas kesehatan dasar sudah tersedia, namun belum sepenuhnya dilengkapi sarana dan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan masih menghadapi keterbatasan. Akselerasi pemerataan menjadi penting agar setiap penduduk, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dapat memperoleh pelayanan yang setara dan berkualitas.

Selain faktor sarana, tantangan pemerataan juga terkait dengan distribusi tenaga kesehatan. Masih terdapat ketimpangan konsentrasi tenaga medis di pusat pelayanan, sementara wilayah terpencil relatif kurang terjangkau. Dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,52 persen pada tahun 2024, kebutuhan terhadap layanan kesehatan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, percepatan pemerataan layanan kesehatan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur, mobilitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan jarak jauh.

b. Penguatan Layanan Promotif dan Preventif Berbasis Komunitas

Upaya promotif dan preventif memiliki peran penting dalam menurunkan angka kesakitan, baik akibat penyakit menular maupun tidak menular. Masih adanya tantangan perilaku hidup bersih dan sehat serta tingginya prevalensi

penyakit menunjukkan perlunya penguatan program kesehatan berbasis masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan, pemanfaatan kader kesehatan, serta pelibatan organisasi lokal menjadi kunci untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan pertumbuhan 2,52 persen (2024) memberikan peluang besar untuk menciptakan masyarakat produktif, namun hal ini hanya dapat tercapai apabila kualitas kesehatan mereka terjamin. Melalui penguatan layanan promotif dan preventif berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat seiring dengan tumbuhnya modal produktif daerah.

c. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan, namun tantangan distribusi dan kualitas tenaga medis masih perlu diperhatikan. Konsentrasi tenaga kesehatan yang lebih banyak di wilayah pusat membuat daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses layanan. Selain itu, peningkatan kualitas kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan teknologi medis modern juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan penyakit yang semakin kompleks.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, kebutuhan tenaga kesehatan akan terus meningkat. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat memperlebar kesenjangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM kesehatan harus diarahkan pada pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas kompetensi, serta penguatan insentif agar tenaga medis termotivasi untuk mengabdikan diri di seluruh wilayah. Dengan langkah tersebut, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih merata, responsif, dan berkelanjutan.



Tabel II.20
Teknis Merumuskan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah penduduk terus meningkat dengan pertumbuhan 2,52% (2024), menjadi modal produktif jika ditopang peningkatan kualitas SDM.	Belum optimalnya kualitas dan akses layanan kesehatan antar wilayah	Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Masyarakat	Industri 5.0	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Penguatan kualitas SDM dan kohesivitas sosial	Akselerasi Pemerataan Layanan Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung
	Belum optimalnya capaian keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)					Penguatan Layanan Promotif dan Preventif Berbasis Komunitas
	Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular					
	Belum optimalnya persebaran dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan					Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Belum optimalnya pembinaan kesejahteraan keluarga berkualitas				Pemanfaatan Bonus Demografi dalam akselerasi pembangunan	Penguatan perencanaan kependudukan terpadu
	Belum optimalnya pemahaman kesehatan reproduksi masyarakat					



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (2), yang mengamanatkan bahwa visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Tana Tidung harus berpedoman pada visi dan misi Bupati Tana Tidung, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan untuk periode tahun 2025–2029 bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pembangunan kesehatan yang lebih operasional dan terukur. Renstra ini mencakup perumusan tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan kesehatan yang difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perluasan akses layanan kesehatan, penurunan angka kesakitan dan kematian, serta penguatan layanan di wilayah terpencil dan khusus. Seluruh proses perencanaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tana Tidung secara menyeluruh.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung, yang mencerminkan kontribusi strategis sektor kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan. Seluruhnya diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerataan layanan kesehatan, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan yang tangguh, adil, dan inklusif.

Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja utama beserta target yang ingin dicapai pada periode 2025–2029 berikut ini:



Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; Meningkatnya Kualitas Keluarga		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	73,51	73,57	73,61	73,66	73,70	73,75	73,79	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	64.66- 65.66	65.86- 66.86	67.06- 68.06	68.26- 69.26	69.46- 70.46	70.66- 71.66	71.86- 72.86	
		Menurunnya Prevalensi Stunting	Persentase Prevalensi Stunting (%)	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,8	
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	0	195	185	175	165	155	145	
			Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)	15	13	10	8	5	3	3	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan (%)	9,43	9,13	8,83	8,53	8,23	7,93	7,63	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)	82,17	82,97	83,77	84,57	85,37	86,17	86,97	
		Meningkatnya Ketentraman Keluarga	Persentase Ketentraman Keluarga (%)	66,59	67,79	68,99	70,19	71,39	72,59	73,39	
		Meningkatnya Kemandirian Keluarga	Persentase Kemandirian Keluarga (%)	56,17	57,37	58,57	59,77	60,97	72,17	63,37	
		Meningkatnya Kebahagiaan Keluarga	Persentase Kebahagiaan Keluarga (%)	74,23	75,43	76,63	77,83	79,03	80,23	81,43	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh diperlukan agar dinas ini mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan merata. Perencanaan ini tidak hanya mencakup pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, tetapi juga meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengelolaan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Perencanaan strategis Dinas Kesehatan harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan daerah dalam mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak. Di sisi lain, strategi yang diterapkan juga harus mengintegrasikan prinsip kesetaraan akses, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen data kesehatan dan penyediaan layanan di daerah terpencil dan kepulauan. Dengan demikian, strategi dan kebijakan yang dirancang secara terpadu ini akan mendorong terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, serta mendukung terwujudnya masyarakat Tana Tidung yang sehat, produktif, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan kesehatan di masa depan.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung memerlukan strategi yang tepat dan responsif terhadap tantangan pembangunan kesehatan daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan dan fokus, serta penyesuaian terhadap lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan operasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan internal diarahkan untuk memperkuat manajemen pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan efisiensi tata kelola sumber daya. Sementara itu, kebijakan eksternal difokuskan pada perluasan akses layanan kesehatan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. Seluruh strategi dan kebijakan ini disusun secara sistematis dalam tahapan implementasi tahunan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan kesehatan lima tahunan yang terarah dan berkelanjutan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Tahapan Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025-2029

Strategi PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan secara merata antar wilayah					
Pengendalian dan antisipasi prevalensi penyakit menular dan tidak menular					
Peningkatan capaian keluarga sehat dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)					
Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pengendalian pertumbuhan penduduk					

3.2.2 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan daerah dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan ini memberikan panduan umum bagi Dinas Kesehatan agar pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan dapat berjalan secara terstruktur, adaptif, dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan lokal yang dihadapi.

Dalam menyusun arah kebijakan, Dinas Kesehatan memperhatikan berbagai faktor strategis seperti kesenjangan layanan antarwilayah, kondisi geografis yang menantang, status kesehatan masyarakat, serta keterbatasan tenaga medis, alat kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan serta teknologi informasi kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta pemenuhan alat kesehatan, obat, dan farmasi, termasuk tenaga kesehatan spesialis. Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pentingnya penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), disertai dengan peningkatan layanan promotif dan preventif. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang menjadi prioritas dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian pada kelompok rentan.

Lebih jauh, arah kebijakan ini juga menekankan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan kesehatan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator program secara administratif, tetapi juga pada pembangunan sistem kesehatan yang tangguh, adil, dan inklusif. Pendekatan holistik melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-5



diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.

Tabel III.3

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan serta teknologi informasi kesehatan
	Pemenuhan dan Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis antar wilayah
	Penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta pelayanan promotif dan preventif
	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan kesehatan daerah
	Pemenuhan dan pemerataan alat kesehatan, ketersediaan obat dan farmasi,
	Peningkatan cakupan dan kualitas kunjungan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak
Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat	Integrasi data kependudukan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah
	Penyediaan layanan KB yang mudah diakses, terutama untuk kelompok usia subur dan remaja
	Pelaksanaan pembinaan Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia



Tabel III.4

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2026	2027	2028	2029	2030
1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata 2. Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan serta teknologi informasi kesehatan 2. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan antar wilayah 3. Penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta pelayanan promotif dan preventif 4. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan kesehatan daerah 5. Pemenuhan alat kesehatan, ketersediaan obat dan farmasi, serta tenaga kesehatan spesialis	1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak 2. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat, ketenagakerjaan berkualitas dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan secara merata antar wilayah					
			Pengendalian dan antisipasi prevalensi penyakit menular dan tidak menular					
			Peningkatan capaian keluarga sehat dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)					
			Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pengendalian pertumbuhan penduduk					



Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2026	2027	2028	2029	2030
	6. Peningkatan cakupan dan kualitas kunjungan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak 7. Integrasi data kependudukan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah 8. Penyediaan layanan KB yang mudah diakses, terutama untuk kelompok usia subur dan remaja 9. Pelaksanaan pembinaan Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia							



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, langkah-langkah rencana strategi operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program-program ini merupakan penjabaran langsung dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029. Semua kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan layanan kesehatan, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra Dinas Kesehatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam setiap program kerja, tercantum program utama yang akan dijalankan untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang dimaksud mencakup indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta komitmen Dinas Kesehatan dalam mencapainya pada tahun tertentu. Dengan demikian, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk melaksanakan program-program ini sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Tana Tidung.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk pembangunan kesehatan periode 2025-2029 terdapat pada tabel berikut.



Tabel IV.1
Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
		Menurunnya Prevalensi Stunting	Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Persentase Prevalensi Stunting (%)		
					Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	



				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	



				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Menurunnya Angka Kesakitan		Angka Kesakitan (%)		



			Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	



				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	



Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Meningkatnya keterlibatan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Meningkatnya penerapan upaya promotif dan preventif melalui Germas dan PHBS di tingkat keluarga dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
	Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	



Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase Fasyankes yang Memiliki Alat Kesehatan/Penunjang Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tingkat daerah sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Kunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	



				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	



					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan JKN dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Meningkatnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



				Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase SDMK yang berkompeten dan memiliki izin praktik aktif sesuai jenis profesinya (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	



Meningkatnya Kualitas Pemberian Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar pada layanan UKP dan UKM di wilayah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat melalui pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang beredar di masyarakat			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	



					Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar teknis dan legalitas berdasarkan hasil pengawasan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya kualitas pemberian rekomendasi teknis sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	



					Meningkatnya kualitas rekomendasi penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	



					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	Meningkatnya Ketentraman Keluarga				Persentase Ketentraman Keluarga (%)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)			Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertiity Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	



					Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand safisfied by modern meyhods) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan advokasi dan KIE tentang pengendalian penduduk dan KB berbasis kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	



					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	



					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	



					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	



					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Meningkatnya Kualitas Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	



					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	



				Meningkatnya kualitas pelayanan KB melalui pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat sasaran dan tepat waktu.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	



					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penguatan Kampung Keluarga Berkualitas melalui integrasi program Bangga Kencana dan intervensi stunting	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	



				Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	Meningkatnya Kemandirian Keluarga			Persentase Kemandirian Keluarga (%)		
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan dokumen perencanaan serta data kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk di daerah.	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	



					Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	
				Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk di daerah	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	



Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	



				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
	Meningkatnya Kebahagiaan Keluarga			Persentase Kebahagiaan Keluarga (%)		
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga melalui pemberdayaan kelompok kegiatan dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	



					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	



				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	



					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	



					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Meningkatnya pembinaan keluarga berisiko stunting melalui pendampingan berbasis masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
1.02.2.14.0.00.01.0001 - Puskesmas Tideng Pale							
- Meningkatnya Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		



				Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
		Menurunnya Prevalensi Stunting		Persentase Prevalensi Stunting (%)		
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
						Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
						Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Menurunnya Angka Kesakitan		Angka Kesakitan (%)		
				Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	



			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular		Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	



				Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan				1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.2.14.0.00.01.0002 - Puskesmas Sesayap Hilir								



- Meningkatnya Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
		Menurunnya Prevalensi Stunting	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Prevalensi Stunting (%)		
					Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		



					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	



				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Angka Kesakitan		Angka Kesakitan (%)		
			Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	



				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	



					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	

					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
					Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)	



			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan JKN dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.2.14.0.00.01.0003 - Puskesmas Tana Lia							
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
		Menurunnya Prevalensi Stunting			Persentase Prevalensi Stunting (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	Menurunnya Angka Kesakitan			Angka Kesakitan (%)		
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	



			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular		Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



				Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	



		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

1.02.2.14.0.00.01.0004 - Puskesmas Kujau							
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		



				Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
Menurunnya Prevalensi Stunting				Persentase Prevalensi Stunting (%)		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak			Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	



					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	



			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Angka Kesakitan			Angka Kesakitan (%)		
			Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	



			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular		Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



				Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	



			Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

1.02.2.14.0.00.01.0005 - Puskesmas Muruk Rian							
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		



				Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
Menurunnya Prevalensi Stunting				Persentase Prevalensi Stunting (%)		
	-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak			Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	



					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		
			-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	



			Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Menurunnya Angka Kesakitan				Angka Kesakitan (%)		
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	



			Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular		Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
					Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.2.14.0.00.01.0006 - Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim							
- Meningkatnya Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
		Menurunnya Kasus Kematian Ibu, dan Bayi			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		



Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan				Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Penundaan operasi elektif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	



					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	



					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Menurunnya Angka Kesakitan		Angka Kesakitan (%)	

			Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Penundaan operasi elektif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	



				Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
				Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Penundaan operasi elektif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	



					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	



					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar		Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
				Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.2.14.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat							
- Meningkatkan Kualitas Keluarga Sesuai Yang Sejahtera dan Sesuai Norma Kehidupan Masyarakat - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;Meningkatnya Kualitas Keluarga				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		



					Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Indeks)		
			Meningkatnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan di daerah		Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



					Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Penundaan operasi elektif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	



					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan		Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	



				Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



Tabel IV.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				132.330.654.750,00		134.053.028.750,00		136.331.731.750,00		138.766.819.750,00		141.358.582.750,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				88.941.309.169,00		89.831.818.733,00		92.224.092.533,00		93.709.338.533,00		95.936.101.533,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	10.559.264.000,00	100	10.409.264.000,00	100	11.200.616.000,00	100	11.061.629.000,00	100	11.792.618.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 06 - Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.800.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.500.000.000,00		1.700.000.000,00		
Terlaksananya layanan jasa penunjang administrasi perkantoran secara efisien dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.800.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.700.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.800.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.500.000.000,00		1.700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.800.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.700.000.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				8.759.264.000,00		8.509.264.000,00		9.300.616.000,00		9.561.629.000,00		10.092.618.000,00		
Terlaksananya BLUD yang melakukan Peningkatan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	8.759.264.000,00	1	8.509.264.000,00	1	9.300.616.000,00	1	9.561.629.000,00	1	10.092.618.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				8.759.264.000,00		8.509.264.000,00		9.300.616.000,00		9.561.629.000,00		10.092.618.000,00		



Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	8.759.264.000,00	1	8.509.264.000,00	1	9.300.616.000,00	1	9.561.629.000,00	1	10.092.618.000,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	100	100	925.490.751,00	100	947.890.751,00	100	985.648.751,00	100	1.039.010.751,00	100	1.108.226.751,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				925.490.751,00		947.890.751,00		985.648.751,00		1.039.010.751,00		1.108.226.751,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	925.490.751,00	1	947.890.751,00	1	985.648.751,00	1	1.039.010.751,00	1	1.108.226.751,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				925.490.751,00		947.890.751,00		985.648.751,00		1.039.010.751,00		1.108.226.751,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	925.490.751,00	1	947.890.751,00	1	985.648.751,00	1	1.039.010.751,00	1	1.108.226.751,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	721.688.251,00	100	744.088.251,00	100	781.846.251,00	100	835.208.251,00	100	904.424.251,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				721.688.251,00		744.088.251,00		781.846.251,00		835.208.251,00		904.424.251,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	721.688.251,00	1	744.088.251,00	1	781.846.251,00	1	835.208.251,00	1	904.424.251,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				721.688.251,00		744.088.251,00		781.846.251,00		835.208.251,00		904.424.251,00		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	721.688.251,00	1	744.088.251,00	1	781.846.251,00	1	835.208.251,00	1	904.424.251,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	323.261.473,00	100	337.661.473,00	100	367.291.473,00	100	412.395.473,00	100	473.221.473,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				323.261.473,00		337.661.473,00		367.291.473,00		412.395.473,00		473.221.473,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	323.261.473,00	1	337.661.473,00	1	367.291.473,00	1	412.395.473,00	1	473.221.473,00		



1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				323.261.473,00		337.661.473,00		367.291.473,00		412.395.473,00		473.221.473,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	323.261.473,00	1	337.661.473,00	1	367.291.473,00	1	412.395.473,00	1	473.221.473,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	276.983.505,00	100	289.783.505,00	100	317.787.505,00	100	361.239.505,00	100	420.387.505,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				276.983.505,00		289.783.505,00		317.787.505,00		361.239.505,00		420.387.505,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	276.983.505,00	1	289.783.505,00	1	317.787.505,00	1	361.239.505,00	1	420.387.505,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				276.983.505,00		289.783.505,00		317.787.505,00		361.239.505,00		420.387.505,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	276.983.505,00	1	289.783.505,00	1	317.787.505,00	1	361.239.505,00	1	420.387.505,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	109.365.895,00	100	118.965.895,00	100	143.718.895,00	100	183.867.895,00	100	239.659.895,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				109.365.895,00		118.965.895,00		143.718.895,00		183.867.895,00		239.659.895,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	109.365.895,00	1	118.965.895,00	1	143.718.895,00	1	183.867.895,00	1	239.659.895,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				109.365.895,00		118.965.895,00		143.718.895,00		183.867.895,00		239.659.895,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	109.365.895,00	1	118.965.895,00	1	143.718.895,00	1	183.867.895,00	1	239.659.895,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (%)	0	100	326.399.317,00	100	372.400.000,00	100	450.000.000,00	100	513.520.000,00	100	632.736.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 07 - Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				326.399.317,00		372.400.000,00		450.000.000,00		513.520.000,00		632.736.000,00		



Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	326.399.317,00	1	372.400.000,00	1	450.000.000,00	1	513.520.000,00	1	632.736.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				326.399.317,00		372.400.000,00		450.000.000,00		513.520.000,00		632.736.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	326.399.317,00	1	372.400.000,00	1	450.000.000,00	1	513.520.000,00	1	632.736.000,00		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Dan Tata Kelola Administrasi Kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,51	80,71	75.698.855.977,00	80,81	76.611.764.858,00	80,91	77.977.183.658,00	81,00	79.302.467.658,00	81,10	80.364.827.658,00	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.277.200,00		365.000.000,00		560.000.000,00		365.000.000,00		560.000.000,00		
Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	9	275.277.200,00	9	365.000.000,00	9	560.000.000,00	9	365.000.000,00	9	560.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	26		26		26		26		26			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.631.200,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		



Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	9	80.631.200,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				90.450.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	90.450.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				84.196.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	26	84.196.000,00	26	90.000.000,00	26	90.000.000,00	26	90.000.000,00	26	90.000.000,00		
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				20.000.000,00		25.000.000,00		220.000.000,00		25.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	220.000.000,00	1	25.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				69.639.663.797,00		69.958.991.178,00		70.929.409.978,00		72.199.693.978,00		72.967.053.978,00		
Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	69.639.663.797,00	2	69.958.991.178,00	2	70.929.409.978,00	2	72.199.693.978,00	2	72.967.053.978,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	13		13		13		13		13			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	541	7.980		8.260		8.400		8.680		8.960			



	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.726.889.397,00		68.930.071.178,00		69.900.489.978,00		71.170.773.978,00		71.938.133.978,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	541	7.980	68.726.889.397,00	8.260	68.930.071.178,00	8.400	69.900.489.978,00	8.680	71.170.773.978,00	8.960	71.938.133.978,00		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				861.120.000,00		904.920.000,00		904.920.000,00		904.920.000,00		904.920.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	13	861.120.000,00	13	904.920.000,00	13	904.920.000,00	13	904.920.000,00	13	904.920.000,00		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				22.593.200,00		71.500.000,00		71.500.000,00		71.500.000,00		71.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	22.593.200,00	2	71.500.000,00	2	71.500.000,00	2	71.500.000,00	2	71.500.000,00		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				29.061.200,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	29.061.200,00	13	52.500.000,00	13	52.500.000,00	13	52.500.000,00	13	52.500.000,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				65.290.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	12	65.290.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.070.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.070.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				59.220.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	12	59.220.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				136.158.000,00		136.158.000,00		136.158.000,00		136.158.000,00		136.158.000,00		
Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	136.158.000,00	2	136.158.000,00	2	136.158.000,00	2	136.158.000,00	2	136.158.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1		1		1		1		1			
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				33.150.000,00		33.150.000,00		33.150.000,00		33.150.000,00		33.150.000,00		



Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	33.150.000,00	2	33.150.000,00	2	33.150.000,00	2	33.150.000,00	2	33.150.000,00		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				103.008.000,00		103.008.000,00		103.008.000,00		103.008.000,00		103.008.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	103.008.000,00	4	103.008.000,00	4	103.008.000,00	4	103.008.000,00	4	103.008.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.121.764.350,00		2.378.190.400,00		2.578.190.400,00		2.828.190.400,00		2.928.190.400,00		
Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			2.121.764.350,00	12	2.378.190.400,00	12	2.578.190.400,00	12	2.828.190.400,00	12	2.928.190.400,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				143.284.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	143.284.000,00	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				157.363.950,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	157.363.950,00	4	195.000.000,00	4	195.000.000,00	4	195.000.000,00	4	195.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.190.400,00		33.190.400,00		33.190.400,00		33.190.400,00		33.190.400,00		



Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3	33.190.400,00	3	33.190.400,00	3	33.190.400,00	3	33.190.400,00	3	33.190.400,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.787.926.000,00		1.950.000.000,00		2.100.000.000,00		2.350.000.000,00		2.450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.787.926.000,00	12	1.950.000.000,00	12	2.100.000.000,00	12	2.350.000.000,00	12	2.450.000.000,00		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.058.732.350,00		1.166.360.000,00		1.166.360.000,00		1.166.360.000,00		1.166.360.000,00		
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	2	1.058.732.350,00	2	1.166.360.000,00	2	1.166.360.000,00	2	1.166.360.000,00	2	1.166.360.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3		3		3		3		3			
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.016.360.000,00		1.016.360.000,00		1.016.360.000,00		1.016.360.000,00		1.016.360.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	2	1.016.360.000,00	2	1.016.360.000,00	2	1.016.360.000,00	2	1.016.360.000,00	2	1.016.360.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.372.350,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	42.372.350,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.824.170.280,00		1.899.265.280,00		1.899.265.280,00		1.899.265.280,00		1.899.265.280,00		



Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.824.170.280,00	12	1.899.265.280,00	12	1.899.265.280,00	12	1.899.265.280,00	12	1.899.265.280,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				674.905.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4	674.905.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.129.265.280,00		1.129.265.280,00		1.129.265.280,00		1.129.265.280,00		1.129.265.280,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.129.265.280,00	12	1.129.265.280,00	12	1.129.265.280,00	12	1.129.265.280,00	12	1.129.265.280,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				577.800.000,00		577.800.000,00		577.800.000,00		577.800.000,00		577.800.000,00		
Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	18	577.800.000,00	18	577.800.000,00	18	577.800.000,00	18	577.800.000,00	18	577.800.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		0		1		0		1			
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				547.800.000,00		577.800.000,00		382.800.000,00		577.800.000,00		382.800.000,00		



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	18	547.800.000,00	18	577.800.000,00	18	382.800.000,00	18	577.800.000,00	18	382.800.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000,00		0,00		195.000.000,00		0,00		195.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.000.000,00	0	0,00	1	195.000.000,00	0	0,00	1	195.000.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				36.427.296.626,00		36.598.457.517,00		36.384.886.717,00		37.334.728.717,00		37.899.728.717,00		
-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	77,46	100	252.006.105,00	100	252.006.105,00	100	252.006.105,00	100	252.006.105,00	100	252.006.105,00	1.02.2.14.0.00.01.0005 - Puskesmas Muruk Rian	
	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,32	100		100		100		100		100			
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	62,48	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	1	252.006.105,00	1	252.006.105,00	1	252.006.105,00	1	252.006.105,00	1	252.006.105,00		
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	42		44		46		48		50			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				21.028.033,00		21.028.033,00		21.028.033,00		21.028.033,00		21.028.033,00		



Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	42	21.028.033,00	44	21.028.033,00	46	21.028.033,00	48	21.028.033,00	50	21.028.033,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				220.978.072,00		220.978.072,00		220.978.072,00		220.978.072,00		220.978.072,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	2	1	220.978.072,00	1	220.978.072,00	1	220.978.072,00	1	220.978.072,00	1	220.978.072,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	68	100	1.200.991.092,00	100	1.300.991.092,00	100	1.300.991.092,00	100	1.300.991.092,00	100	1.300.991.092,00	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	65	100		100		100		100		100			
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	56	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,00		11.664.249.992,00		11.664.249.992,00		11.764.249.992,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	4	1.200.991.092,00	4	1.300.991.092,00	4	1.300.991.092,00	4	1.300.991.092,00	4	1.300.991.092,00		
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	396	636		662		688		716		744			



	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	327	667		693		721		750		780			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	364	606		630		655		681		709			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.531	2.745		2.853		2.965		3.081		3.081			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				105.200.000,00		105.200.000,00		105.200.000,00		105.200.000,00		105.200.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	327	667	105.200.000,00	693	105.200.000,00	721	105.200.000,00	750	105.200.000,00	780	105.200.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				87.734.292,00		87.734.292,00		87.734.292,00		87.734.292,00		87.734.292,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	396	636	87.734.292,00	662	87.734.292,00	688	87.734.292,00	716	87.734.292,00	744	87.734.292,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				171.198.400,00		171.198.400,00		171.198.400,00		171.198.400,00		171.198.400,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	364	606	171.198.400,00	630	171.198.400,00	655	171.198.400,00	681	171.198.400,00	709	171.198.400,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				131.594.400,00		131.594.400,00		131.594.400,00		131.594.400,00		131.594.400,00		



Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.531	2.745	131.594.400,00	2.853	131.594.400,00	2.965	131.594.400,00	3.081	131.594.400,00	3.081	131.594.400,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				623.736.000,00		623.736.000,00		623.736.000,00		623.736.000,00		623.736.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	8	8	623.736.000,00	8	623.736.000,00	8	623.736.000,00	8	623.736.000,00	8	623.736.000,00		
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				61.528.000,00		61.528.000,00		61.528.000,00		61.528.000,00		61.528.000,00		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	61.528.000,00	2	61.528.000,00	2	61.528.000,00	2	61.528.000,00	2	61.528.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	119.509.249,00	100	119.509.249,00	100	119.509.249,00	100	119.509.249,00	100	119.509.249,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	



	sesuai standar (%)													
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	119.509.249,00	1	119.509.249,00	1	119.509.249,00	1	119.509.249,00	1	119.509.249,00		
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	149	274		285		297		309		321			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				29.509.249,00		29.509.249,00		29.509.249,00		29.509.249,00		29.509.249,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	149	274	29.509.249,00	285	29.509.249,00	297	29.509.249,00	309	29.509.249,00	321	29.509.249,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	46,79	100	138.311.749,00	100	138.311.749,00	100	138.311.749,00	100	138.311.749,00	100	138.311.749,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	



	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	36,30	100		100		100		100		100		
	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	61,59	100		100		100		100		100		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	138.311.749,00	1	138.311.749,00	1	138.311.749,00	1	138.311.749,00	1	138.311.749,00	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	78	183		190		198		205		214		
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				63.311.749,00		63.311.749,00		63.311.749,00		63.311.749,00		63.311.749,00	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	78	183	63.311.749,00	190	63.311.749,00	198	63.311.749,00	205	63.311.749,00	214	63.311.749,00	
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	2	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	47,45	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	44,49	100		100		100		100		100		



	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	48,02	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00		
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33	79		82		86		89		93			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33	79	50.000.000,00	82	50.000.000,00	86	50.000.000,00	89	50.000.000,00	93	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	54,80	100	133.016.495,00	100	133.016.495,00	100	133.016.495,00	100	133.016.495,00	100	133.016.495,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	63,15	100		100		100		100		100			
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	61,24	100		100		100		100		100			



1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	133.016.495,00	1	133.016.495,00	1	133.016.495,00	1	133.016.495,00	1	133.016.495,00		
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	48	88		92		95		99		103			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				28.016.495,00		28.016.495,00		28.016.495,00		28.016.495,00		28.016.495,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	48	88	28.016.495,00	92	28.016.495,00	95	28.016.495,00	99	28.016.495,00	103	28.016.495,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	21,22	71	2.486.179.000,00	72	2.486.179.000,00	73	2.486.179.000,00	74	2.486.179.000,00	75	2.486.179.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,0 0		11.664.249.992,0 0		11.664.249.992,0 0		11.764.249.992,0 0		
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	2.486.179.000,00	1	2.486.179.000,00	1	2.486.179.000,00	1	2.486.179.000,00	1	2.486.179.000,00		



	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.444.703.000,00		2.444.703.000,00		2.444.703.000,00		2.444.703.000,00		2.444.703.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	4	2.444.703.000,00	4	2.444.703.000,00	4	2.444.703.000,00	4	2.444.703.000,00	4	2.444.703.000,00	
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				41.476.000,00		41.476.000,00		41.476.000,00		41.476.000,00		41.476.000,00	
Terseleenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	41.476.000,00	1	41.476.000,00	1	41.476.000,00	1	41.476.000,00	1	41.476.000,00	
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	19,62	71	30.000.000,00	72	30.000.000,00	73	30.000.000,00	74	30.000.000,00	75	30.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00	
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	30	71	50.000.000,00	72	50.000.000,00	73	50.000.000,00	74	50.000.000,00	75	50.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00	
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	



1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	14,20	71	35.000.000,00	72	35.000.000,00	73	35.000.000,00	74	35.000.000,00	75	35.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	26,11	71	35.000.000,00	72	35.000.000,00	73	35.000.000,00	74	35.000.000,00	75	35.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	15	71	6.800.000,00	72	6.800.000,00	73	6.800.000,00	74	6.800.000,00	75	6.800.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	



1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		
Meningkatnya cakupan penerapan pilar-pilar STBM di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memiliki Alat Kesehatan /Penunjang Sesuai Standar (%)	32,75	45	25.108.920.358,00	50	24.066.687.400,0 0	55	24.692.958.600,0 0	60	25.202.958.600,0 0	65	26.017.958.600,0 0	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	86,94	86,98		87		87,02		87,04		87,06			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	71	85		85		85		100		100			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	28	57		71		85		100		100			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	42	71		86		100		100		100			
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	20	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				20.585.431.558,00		18.890.912.600,0 0		18.872.958.600,0 0		19.372.958.600,0 0		20.072.958.600,0 0		
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tingkat daerah sesuai standar	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	1	20.585.431.558,00	0	18.890.912.600,0 0	0	18.872.958.600,0 0	0	19.372.958.600,0 0	0	20.072.958.600,0 0		
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	0	50		50		50		50		50			



	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	4		5		5		5		5			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	8	3		3		3		3		3			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	49	40		36		45		48		43			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	0		4		2		2		2			



	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	250	150		160		170		180		190			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	2		2		2		2		2			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhi Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				3.724.146.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	1	3.724.146.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		1.000.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	4	1	0,00	1	1.000.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				504.607.000,00		504.607.000,00		504.607.000,00		504.607.000,00		504.607.000,00		



Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	1	504.607.000,00	1	504.607.000,00	1	504.607.000,00	1	504.607.000,00	1	504.607.000,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				1.582.046.000,00		5.000.000.000,00		1.582.046.000,00		1.582.046.000,00		1.582.046.000,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	4	1.582.046.000,00	5	5.000.000.000,00	5	1.582.046.000,00	5	1.582.046.000,00	5	1.582.046.000,00		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				730.163.500,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	8	3	730.163.500,00	3	850.000.000,00	3	850.000.000,00	3	850.000.000,00	3	850.000.000,00		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				300.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		350.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0	0	0,00	3	350.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0,00		500.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		



Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0,00	4	500.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.191.915.500,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	49	40	1.191.915.500,00	36	1.100.000.000,00	45	1.100.000.000,00	48	1.100.000.000,00	43	1.100.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				248.940.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	250	150	248.940.000,00	160	350.000.000,00	170	350.000.000,00	180	350.000.000,00	190	350.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				9.013.040.800,00		5.000.000.000,00		6.500.000.000,00		6.900.000.000,00		7.500.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	2	9.013.040.800,00	2	5.000.000.000,00	2	6.500.000.000,00	2	6.900.000.000,00	2	7.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.954.267.158,00		2.400.000.000,00		3.500.000.000,00		3.600.000.000,00		3.700.000.000,00		



Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	8	8	1.954.267.158,00	8	2.400.000.000,00	8	3.500.000.000,00	8	3.600.000.000,00	8	3.700.000.000,00		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				5.040.000,00		5.040.000,00		5.040.000,00		5.040.000,00		5.040.000,00		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	0	50	5.040.000,00	50	5.040.000,00	50	5.040.000,00	50	5.040.000,00	50	5.040.000,00		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				331.265.600,00		331.265.600,00		331.265.600,00		331.265.600,00		331.265.600,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	12	12	331.265.600,00	12	331.265.600,00	12	331.265.600,00	12	331.265.600,00	12	331.265.600,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,00		11.664.249.992,00		11.664.249.992,00		11.764.249.992,00		
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan JKN dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	4.120.774.800,00	0	4.520.774.800,00	5	5.200.000.000,00	1	5.200.000.000,00	0	5.300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4.120.774.800,00		4.520.774.800,00		4.750.000.000,00		5.000.000.000,00		5.300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	4	4.120.774.800,00	4	4.520.774.800,00	4	4.750.000.000,00	4	5.000.000.000,00	4	5.300.000.000,00		



1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		450.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	0,00	0	0,00	5	450.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				71.444.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		7	71.444.000,00	7	150.000.000,00	7	165.000.000,00	7	170.000.000,00	7	175.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				71.444.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		7	71.444.000,00	7	150.000.000,00	7	165.000.000,00	7	170.000.000,00	7	175.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				331.270.000,00		505.000.000,00		455.000.000,00		460.000.000,00		470.000.000,00		
Meningkatnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan di daerah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	0	331.270.000,00	2	505.000.000,00	2	455.000.000,00	2	460.000.000,00	2	470.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	5	7		7		7		7		7			
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				88.300.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	5	7	88.300.000,00	7	95.000.000,00	7	105.000.000,00	7	110.000.000,00	7	120.000.000,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				242.970.000,00		310.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12	4	242.970.000,00	4	310.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	84,04	85,04	25.000.000,00	85,54	25.000.000,00	86,04	25.000.000,00	86,54	25.000.000,00	87,04	25.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		



Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan JKN dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	85,69	86,69	35.000.000,00	87,19	35.000.000,00	87,69	35.000.000,00	88,19	35.000.000,00	88,69	35.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	87,05	88,05	35.000.000,00	88,55	35.000.000,00	89,05	35.000.000,00	89,55	35.000.000,00	90,05	35.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja (Poin)	69,20	70,20	5.000.000,00	70,70	5.000.000,00	71,20	5.000.000,00	71,70	5.000.000,00	72,20	5.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	



1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	95,75	100	2.128.000.000,00	100	2.350.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	1.950.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 06 - Rumah Sakit Umum Daerah Akhdad Berahim	
	Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	87,88	87,7		87,9		88		88,02		88,04			
	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	0	84		86		89		91		93			
	Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	98,91	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	87,66	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	96,66	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formulariu m (%)	98,58	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	89,92	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	99,83	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penundaan operasi elektif (%)	0	4		3		2		2		1			
	Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	60	85		88		90		95		98			



1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.028.000.000,00		1.250.000.000,00		1.350.000.000,00		1.450.000.000,00		1.650.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	3	1.028.000.000,00	3	1.250.000.000,00	3	1.350.000.000,00	3	1.450.000.000,00	3	1.650.000.000,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	131	15		60		65		70		70			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	6	2		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	0		60		60		60		60			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik				378.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		



Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	131	15	378.000.000,00	60	300.000.000,00	65	500.000.000,00	70	500.000.000,00	70	600.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	0	0,00	60	100.000.000,00	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				200.000.000,00		400.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	6	2	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		200.000.000,00		



Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.050.000.000,00		800.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	1.050.000.000,00	1	800.000.000,00	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan di daerah	Persentase Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium (%)	100	100	258.606.151,00	100	900.000.000,00	100	910.158.000,00	100	900.000.000,00	100	850.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 07 - Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat	
	Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	100	100		100		100		100		100			
	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (%)	0	81		81		81		81		81			
	Indeks Kepuasan Pasien (Poin)	88,79	88,85		88,85		88,85		88,85		88,85			



	Persentase Kepatuhan terhadap clinical pathway (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan waktu visite dokter (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelaporan hasil kritis laboratorium (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase Penundaan operasi elektif (%)	0	5		5		5		5		5			
	Persentase Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (%)	0	81		81		81		81		81			
	Persentase Waktu tunggu rawat jalan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		450.000.000,00		310.158.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0,00	1	450.000.000,00	1	310.158.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	0		15		15		15		15			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		



Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	15	150.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	200.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				0,00		150.000.000,00		110.158.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	110.158.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0	0,00	2	150.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				258.606.151,00		350.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	258.606.151,00	0	350.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	0	250.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	4		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				258.606.151,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	4	258.606.151,00	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		



1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	86,94	86,98	1.379.098.400,00	87	1.579.098.400,00	87,02	1.379.098.400,00	87,04	1.379.098.400,00	87,06	1.379.098.400,00	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,00		11.664.249.992,00		11.664.249.992,00		11.764.249.992,00		
Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	3	6	1.379.098.400,00	6	1.579.098.400,00	6	1.379.098.400,00	6	1.379.098.400,00	6	1.379.098.400,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.220	5.763		5.990		6.227		6.474		6.730			
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				73.673.600,00		73.673.600,00		73.673.600,00		73.673.600,00		73.673.600,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.220	5.763	73.673.600,00	5.990	73.673.600,00	6.227	73.673.600,00	6.474	73.673.600,00	6.730	73.673.600,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.305.424.800,00		1.505.424.800,00		1.305.424.800,00		1.305.424.800,00		1.305.424.800,00		



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	3	6	1.305.424.800,00	6	1.505.424.800,00	6	1.305.424.800,00	6	1.305.424.800,00	6	1.305.424.800,00		
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	82,75	83,25	50.000.000,00	83,5	50.000.000,00	83,75	50.000.000,00	84	50.000.000,00	84,25	50.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		
Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.228	2.463		2.561		2.663		2.769		2.789			
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.228	2.463	25.000.000,00	2.561	25.000.000,00	2.663	25.000.000,00	2.769	25.000.000,00	2.789	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	87,50	88	80.000.000,00	88,25	80.000.000,00	88,5	80.000.000,00	88,75	80.000.000,00	89	80.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		
Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		



	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.355	1.493		1.552		1.614		1.678		1.745		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.355	1.493	30.000.000,00	1.552	30.000.000,00	1.614	30.000.000,00	1.678	30.000.000,00	1.745	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	83,11	88	85.000.000,00	83,86	85.000.000,00	84,11	85.000.000,00	84,36	85.000.000,00	84,61	85.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00	
Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	
	Jumlah dokumen upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33	72		82		86		89		93		
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33	72	50.000.000,00	82	50.000.000,00	86	50.000.000,00	89	50.000.000,00	93	50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	



Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	74,66	75,16	70.000.000,00	75,41	70.000.000,00	75,66	70.000.000,00	75,91	70.000.000,00	76,16	70.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		
Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	551	816		848		881		916		952			
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	551	816	35.000.000,00	848	35.000.000,00	881	35.000.000,00	916	35.000.000,00	952	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting (%)	80,96	81,46	45.000.000,00	81,71	45.000.000,00	81,96	45.000.000,00	82,21	45.000.000,00	82,46	45.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		



Terselenggaranya intervensi spesifik stunting sesuai standar bagi sasaran prioritas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	245	348		361		375		390		405			
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	245	348	20.000.000,00	361	20.000.000,00	375	20.000.000,00	390	20.000.000,00	405	20.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Cakupan penemuan kasus TB (%)	45,57	90	996.065.500,00	90	996.065.500,00	90	996.065.500,00	90	996.065.500,00	90	996.065.500,00	1.02.2.14.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,00		11.664.249.992,00		11.664.249.992,00		11.764.249.992,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	12	996.065.500,00	12	996.065.500,00	12	996.065.500,00	12	996.065.500,00	12	996.065.500,00		
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	8	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	294	516		537		558		580		603			



	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	748	875		909		946		981		1.017			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	46	545		545		545		545		545			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				96.991.000,00		96.991.000,00		96.991.000,00		96.991.000,00		96.991.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	294	516	96.991.000,00	537	96.991.000,00	558	96.991.000,00	580	96.991.000,00	603	96.991.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				41.082.000,00		41.082.000,00		41.082.000,00		41.082.000,00		41.082.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	748	875	41.082.000,00	909	41.082.000,00	946	41.082.000,00	981	41.082.000,00	1.017	41.082.000,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				215.240.000,00		215.240.000,00		215.240.000,00		215.240.000,00		215.240.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	4	2	215.240.000,00	2	215.240.000,00	2	215.240.000,00	2	215.240.000,00	2	215.240.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				158.012.000,00		158.012.000,00		158.012.000,00		158.012.000,00		158.012.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	3	158.012.000,00	3	158.012.000,00	3	158.012.000,00	3	158.012.000,00	3	158.012.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				436.187.500,00		436.187.500,00		436.187.500,00		436.187.500,00		436.187.500,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	12	436.187.500,00	12	436.187.500,00	12	436.187.500,00	12	436.187.500,00	12	436.187.500,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	8	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	46	545	6.300.000,00	545	6.300.000,00	545	6.300.000,00	545	6.300.000,00	545	6.300.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				42.253.000,00		42.253.000,00		42.253.000,00		42.253.000,00		42.253.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	2	42.253.000,00	2	42.253.000,00	2	42.253.000,00	2	42.253.000,00	2	42.253.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	168	212		221		230		239		248		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	168	212	25.000.000,00	221	25.000.000,00	230	25.000.000,00	239	25.000.000,00	248	25.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00	
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	118	141		147		153		159		165		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0	141		151		161		171		181		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1	1		1		1		1		1		



	Menular (Dokumen)												
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	118	141	0,00	147	0,00	153	0,00	159	0,00	165	0,00	
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0	141	50.000.000,00	151	50.000.000,00	161	50.000.000,00	171	50.000.000,00	181	50.000.000,00	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00	
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		



	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	46	61		64		66		69		72		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	46	61	35.000.000,00	64	35.000.000,00	66	35.000.000,00	69	35.000.000,00	72	35.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00	
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	53	68		71		74		77		80		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	53	68	35.000.000,00	71	35.000.000,00	74	35.000.000,00	77	35.000.000,00	80	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (%)	100	100	111.378.000,00	100	111.378.000,00	100	111.378.000,00	100	111.378.000,00	100	111.378.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	111.378.000,00	1	111.378.000,00	1	111.378.000,00	1	111.378.000,00	1	111.378.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	27	33		34		35		37		38			
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	27	33	25.000.000,00	34	25.000.000,00	35	25.000.000,00	37	25.000.000,00	38	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				17.528.000,00		17.528.000,00		17.528.000,00		17.528.000,00		17.528.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	17.528.000,00	1	17.528.000,00	1	17.528.000,00	1	17.528.000,00	1	17.528.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				68.850.000,00		68.850.000,00		68.850.000,00		68.850.000,00		68.850.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	68.850.000,00	1	68.850.000,00	1	68.850.000,00	1	68.850.000,00	1	68.850.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	7,2	11,4	251.916.000,00	10,4	301.916.000,00	9,4	301.916.000,00	8,4	301.916.000,00	7,4	301.916.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100		100		100		100		100			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,5	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4			
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,77	85,77		86,27		86,77		87,27		87,77			
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	22,9	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.435.024.792,00		11.185.024.792,00		11.664.249.992,00		11.664.249.992,00		11.764.249.992,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	39	53	251.916.000,00	55	301.916.000,00	58	301.916.000,00	60	301.916.000,00	62	301.916.000,00		
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	0		7		7		7		7			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.318	20.289		21.098		21.940		22.815		23.726			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.500	1.698		1.763		1.831		1.902		1.976			



	(Orang)													
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.863	3.191		3.318		3.450		3.588		3.732			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	523	574		597		621		645		671			
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				11.340.000,00		11.340.000,00		11.340.000,00		11.340.000,00		11.340.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.318	20.289	11.340.000,00	21,098	11.340.000,00	21.940	11.340.000,00	22.815	11.340.000,00	23.726	11.340.000,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				28.536.000,00		28.536.000,00		28.536.000,00		28.536.000,00		28.536.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.500	1.698	28.536.000,00	1.763	28.536.000,00	1.831	28.536.000,00	1.902	28.536.000,00	1.976	28.536.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.863	3.191	7.560.000,00	3.318	7.560.000,00	3.450	7.560.000,00	3.588	7.560.000,00	3.732	7.560.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		7.560.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	523	574	7.560.000,00	597	7.560.000,00	621	7.560.000,00	645	7.560.000,00	671	7.560.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				15.680.000,00		15.680.000,00		15.680.000,00		15.680.000,00		15.680.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	39	53	15.680.000,00	55	15.680.000,00	58	15.680.000,00	60	15.680.000,00	62	15.680.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				181.240.000,00		181.240.000,00		181.240.000,00		181.240.000,00		181.240.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	25	181.240.000,00	25	181.240.000,00	25	181.240.000,00	25	181.240.000,00	25	181.240.000,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	0	0,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		424.509.249,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12	15	110.000.000,00	16	110.000.000,00	17	110.000.000,00	17	110.000.000,00	17	110.000.000,00		
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	542	610		634		659		685		712			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	542	610	25.000.000,00	634	25.000.000,00	659	25.000.000,00	685	25.000.000,00	712	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12	15	25.000.000,00	16	25.000.000,00	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		628.311.749,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	10	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5	7		7		7		8		9			



	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	471	538		559		581		604		628			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5	10		10		10		10		10			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	471	538	30.000.000,00	559	30.000.000,00	581	30.000.000,00	604	30.000.000,00	628	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	8	30.000.000,00	9	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100	146.498.527,00	100	146.498.527,00	100	146.498.527,00	100	146.498.527,00	100	146.498.527,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		561.498.527,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	10	146.498.527,00	10	146.498.527,00	11	146.498.527,00	11	146.498.527,00	11	146.498.527,00		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210	265		272		282		293		304			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	13		14		15		16		17			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				41.498.527,00		41.498.527,00		41.498.527,00		41.498.527,00		41.498.527,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210	265	41.498.527,00	272	41.498.527,00	282	41.498.527,00	293	41.498.527,00	304	41.498.527,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	13	35.000.000,00	14	35.000.000,00	15	35.000.000,00	16	35.000.000,00	17	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		



Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	11	35.000.000,00	11	35.000.000,00	11	35.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		518.016.495,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	142	173	140.000.000,00	179	140.000.000,00	186	140.000.000,00	193	140.000.000,00	200	140.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	20		21		20		19		18			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	9	12		12		13		13		13			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	142	173	35.000.000,00	179	35.000.000,00	186	35.000.000,00	193	35.000.000,00	200	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		



Berat														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	9	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	13	35.000.000,00	13	35.000.000,00	13	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	20	35.000.000,00	21	35.000.000,00	20	35.000.000,00	19	35.000.000,00	18	35.000.000,00		
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (%)	100	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		485.184.105,00		
Meningkatnya deteksi dini dan pemantauan kasus Penyakit Tidak Menular melalui layanan UKM & UKP Rujukan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	4	6	65.000.000,00	6	65.000.000,00	6	65.000.000,00	6	65.000.000,00	6	65.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	4	6		6		7		8					
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101	115		119		123		127		132			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		



Lanjut														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101	115	20.000.000,00	119	20.000.000,00	123	20.000.000,00	127	20.000.000,00	132	20.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	4	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	7	25.000.000,00	8	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	4	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				6.319.620.955,00		6.816.304.500,00		6.916.304.500,00		6.916.304.500,00		6.716.304.500,00		
Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	0	100	4.312.736.000,00	100	4.512.736.000,00	100	4.662.736.000,00	100	4.662.736.000,00	100	4.462.736.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 06 - Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				4.150.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	0	70	4.150.000.000,00	75	4.300.000.000,00	80	4.400.000.000,00	80	4.400.000.000,00	75	4.200.000.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				4.150.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.200.000.000,00		



Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	0	70	4.150.000.000,00	75	4.300.000.000,00	80	4.400.000.000,00	80	4.400.000.000,00	75	4.200.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				162.736.000,00		212.736.000,00		262.736.000,00		262.736.000,00		262.736.000,00		
Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	0	15	162.736.000,00	25	212.736.000,00	30	262.736.000,00	30	262.736.000,00	30	262.736.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				162.736.000,00		212.736.000,00		262.736.000,00		262.736.000,00		262.736.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	0	15	162.736.000,00	25	212.736.000,00	30	262.736.000,00	30	262.736.000,00	30	262.736.000,00		
Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60	80	2.006.884.955,00	100	2.153.568.500,00	100	2.153.568.500,00	100	2.153.568.500,00	100	2.153.568.500,00	1.02.2.14.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	50	50		50		100		100		100			
	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	60	80		100		100		100		100			
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	18,72	19,72		20,22		20,72		21,22		21,72			
	Persentase SDMK yang berkompeten dan memiliki izin praktik aktif sesuai jenis profesinya (%)	85	100		100		100		100		100			



1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				24.640.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pemberian Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	4	24.640.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				11.790.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	0	4	11.790.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				12.850.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	4	12.850.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				1.713.568.500,00		1.713.568.500,00		1.713.568.500,00		1.713.568.500,00		1.713.568.500,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemuenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar pada layanan UKP dan UKM di wilayah kabupaten	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	78	30	1.713.568.500,00	30	1.713.568.500,00	30	1.713.568.500,00	30	1.713.568.500,00	30	1.713.568.500,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			



	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				79.942.000,00		79.942.000,00		79.942.000,00		79.942.000,00		79.942.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	2	79.942.000,00	2	79.942.000,00	2	79.942.000,00	2	79.942.000,00	2	79.942.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				1.555.889.500,00		1.555.889.500,00		1.555.889.500,00		1.555.889.500,00		1.555.889.500,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	78	30	1.555.889.500,00	30	1.555.889.500,00	30	1.555.889.500,00	30	1.555.889.500,00	30	1.555.889.500,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				77.737.000,00		77.737.000,00		77.737.000,00		77.737.000,00		77.737.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	4	77.737.000,00	4	77.737.000,00	4	77.737.000,00	4	77.737.000,00	4	77.737.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				268.676.455,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	33,63	52,66	268.676.455,00	63,34	350.000.000,00	74,00	350.000.000,00	84,69	350.000.000,00	95,37	350.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				268.676.455,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		



Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	33,63	52,66	268.676.455,00	63,34	350.000.000,00	74,00	350.000.000,00	84,69	350.000.000,00	95,37	350.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	0	100	0,00	100	150.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 07 - Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat	
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	0	0	0,00	15	150.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	0	0	0,00	15	150.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				201.670.000,00		215.690.000,00		215.690.000,00		215.690.000,00		215.690.000,00		
Meningkatnya perlindungan masyarakat melalui pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	64	80	201.670.000,00	85	215.690.000,00	90	215.690.000,00	95	215.690.000,00	100	215.690.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	56,09	71		72		73		74		75			



	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar teknis dan legalitas berdasarkan hasil pengawasan (%)	60	100		100		100		100		100		
	Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan (%)	41,6	60		70		80		90		100		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	0	35		50		65		80		90		
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	40	60		70		80		90		100		
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	60		70		80		90		100		
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.980.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberian rekomendasi teknis sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	9	20	10.980.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.980.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	9	20	10.980.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	



1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas rekomendasi penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	40	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	70	100.000.000,00	75	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	40	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	70	100.000.000,00	75	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		



Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	10	35.690.000,00	13	35.690.000,00	16	35.690.000,00	20	35.690.000,00	23	35.690.000,00		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		35.690.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	10	35.690.000,00	13	35.690.000,00	16	35.690.000,00	20	35.690.000,00	23	35.690.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		



Tindak Lanjut Pengawasan														
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				440.758.000,00		590.758.000,00		590.758.000,00		590.758.000,00		590.758.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	21,22	71	305.068.000,00	72	455.068.000,00	73	455.068.000,00	74	455.068.000,00	75	455.068.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		
Meningkatnya keterlibatan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	40	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		15.070.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	40	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00	100	15.070.000,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				189.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		
Meningkatnya penerapan upaya promotif dan preventif melalui Germas dan PHBS di tingkat keluarga dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	2	189.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00		



1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				189.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		289.998.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	2	189.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00	2	289.998.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	100	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	100	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	19,62	71	50.000.000,00	72	50.000.000,00	73	50.000.000,00	74	50.000.000,00	75	50.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 01 - Puskesmas Tideng Pale	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		



1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	30	71	50.000.000,00	72	50.000.000,00	73	50.000.000,00	74	50.000.000,00	75	50.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 02 - Puskesmas Sesayap Hilir	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	14,20	71	15.240.000,00	72	15.240.000,00	73	15.240.000,00	74	15.240.000,00	75	15.240.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 03 - Puskesmas Tana Lia	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		



Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		15.240.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00	1	15.240.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	26,11	71	5.000.000,00	72	5.000.000,00	73	5.000.000,00	74	5.000.000,00	75	5.000.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kujau	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (%)	15	71	15.450.000,00	72	15.450.000,00	73	15.450.000,00	74	15.450.000,00	75	15.450.000,00	1.02.2.14.0.00.01.00 05 - Puskesmas Muruk Rian	



1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		
Meningkatnya Posyandu aktif siklus hidup	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00	1	15.450.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				186.345.250,00		586.345.250,00		586.345.250,00		586.345.250,00		586.345.250,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				20.360.000,00		125.360.000,00		125.360.000,00		125.360.000,00		125.360.000,00		
Meningkatnya Kemandirian Keluarga				0		0		0		0		0	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	1,78	1,76	20.360.000,00	1,75	125.360.000,00	1,74	125.360.000,00	1,73	125.360.000,00	1,72	125.360.000,00		
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				20.360.000,00		65.360.000,00		65.360.000,00		65.360.000,00		65.360.000,00		



Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan dokumen perencanaan serta data kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk di daerah.	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	34	20.360.000,00	34	65.360.000,00	34	65.360.000,00	34	65.360.000,00	34	65.360.000,00		
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				7.100.000,00		52.100.000,00		52.100.000,00		52.100.000,00		52.100.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	7.100.000,00	1	52.100.000,00	1	52.100.000,00	1	52.100.000,00	1	52.100.000,00		
2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				13.260.000,00		13.260.000,00		13.260.000,00		13.260.000,00		13.260.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	34	13.260.000,00	34	13.260.000,00	34	13.260.000,00	34	13.260.000,00	34	13.260.000,00		



2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk di daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1	0	0,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	3	5		10		13		15		15			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	0		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	52	0		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	52	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		



2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	3	5	0,00	10	10.000.000,00	13	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				117.255.250,00		322.255.250,00		322.255.250,00		322.255.250,00		322.255.250,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand satisfied by modern meyhods) (%)	91,77	91,97	117.255.250,00	92,07	322.255.250,00	92,17	322.255.250,00	92,27	322.255.250,00	92,37	322.255.250,00	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertiiity Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	20,11	20,07		20,05		20,03		20,01		19,99			
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69,15	69,19		69,21		69,23		69,25		69,27			



	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	20,90	28,90		32,90		36,90		40,90		44,90			
	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	6,80	6,76		6,74		6,72		6,70		6,68			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				0,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan advokasi dan KIE tentang pengendalian penduduk dan KB berbasis kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	0	0,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00		
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	3	0		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0	0		4		4		4		4			



	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	30	0		1		1		1		1			
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0	0	0,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	30	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		



Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	3	0	0,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	5	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		



Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	0	0,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)			0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	62	62		62		62		62		62			
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	0		0		0		0		0			



	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)													
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	62	62	0,00	62	35.000.000,00	62	35.000.000,00	62	35.000.000,00	62	35.000.000,00		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)			0		0		0		0		0		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga				0		0		0		0		0		



Berencana (PKB/PLKB)														
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota				81.151.000,00		81.151.000,00		81.151.000,00		81.151.000,00		81.151.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan KB melalui pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat sasaran dan tepat waktu.	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4	4	81.151.000,00	4	81.151.000,00	4	81.151.000,00	4	81.151.000,00	4	81.151.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	30	147		147		147		147		147			
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	3	0		2		2		2		2			



2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				22.920.000,00		22.920.000,00		22.920.000,00		22.920.000,00		22.920.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4	4	22.920.000,00	4	22.920.000,00	4	22.920.000,00	4	22.920.000,00	4	22.920.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				32.521.000,00		32.521.000,00		32.521.000,00		32.521.000,00		32.521.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	30	147	32.521.000,00	147	32.521.000,00	147	32.521.000,00	147	32.521.000,00	147	32.521.000,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	3	0	0,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				25.710.000,00		10.710.000,00		10.710.000,00		10.710.000,00		10.710.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	25.710.000,00	1	10.710.000,00	1	10.710.000,00	1	10.710.000,00	1	10.710.000,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan				36.104.250,00		71.104.250,00		71.104.250,00		71.104.250,00		71.104.250,00		



Kesertaan Ber-KB														
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penguatan Kampung Keluarga Berkualitas melalui integrasi program Bangga Kencana dan intervensi stunting	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	10	10	36.104.250,00	10	71.104.250,00	10	71.104.250,00	10	71.104.250,00	10	71.104.250,00		
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				36.104.250,00		36.104.250,00		36.104.250,00		36.104.250,00		36.104.250,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	5	5	36.104.250,00	5	36.104.250,00	5	36.104.250,00	5	36.104.250,00	5	36.104.250,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	10	10	0,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		



2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				48.730.000,00		138.730.000,00		138.730.000,00		138.730.000,00		138.730.000,00		
Meningkatnya Kebahagiaan Keluarga				0		0		0		0		0	1.02.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	60	70	48.730.000,00	75	138.730.000,00	80	138.730.000,00	85	138.730.000,00	90	138.730.000,00		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				33.410.000,00		123.410.000,00		123.410.000,00		123.410.000,00		123.410.000,00		
Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga melalui pemberdayaan kelompok kegiatan dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	41	43	33.410.000,00	45	123.410.000,00	47	123.410.000,00	49	123.410.000,00	50	123.410.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	96	96		96		96		96		96		
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				12.060.000,00		12.060.000,00		12.060.000,00		12.060.000,00		12.060.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	1	12.060.000,00	1	12.060.000,00	1	12.060.000,00	1	12.060.000,00	1	12.060.000,00	
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	



Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10	0,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		



Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	96	96	0,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00		
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	41	43	0,00	45	15.000.000,00	47	15.000.000,00	49	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				21.350.000,00		21.350.000,00		21.350.000,00		21.350.000,00		21.350.000,00		



Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	2	21.350.000,00	2	21.350.000,00	2	21.350.000,00	2	21.350.000,00	2	21.350.000,00		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		
Meningkatnya pembinaan keluarga berisiko stunting melalui pendampingan berbasis masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	100	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)				15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		15.320.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	100	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00	100	15.320.000,00		

Tabel IV.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	



			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	



			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
	Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting		1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat		1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular		1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular		1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	



		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	



			Standar	
			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
4.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	



			2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
5.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	



			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	



			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
6.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	



			2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
1.02.2.14.0.00.01.0001 - Puskesmas Tideng Pale				
7.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	



			Gangguan Jiwa Berat	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
8.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.2.14.0.00.01.0002 - Puskesmas Sesayap Hilir				
9.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
10.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	



		masyarakat	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.2.14.0.00.01.0003 - Puskesmas Tana Lia				
11.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	



		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
12.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.2.14.0.00.01.0004 - Puskesmas Kujau				
13.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	



	Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	



		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
14.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.2.14.0.00.01.0005 - Puskesmas Muruk Rian				
15.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	



		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Meningkatnya pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
		Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
		-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
16.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.2.14.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat				
17.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan di daerah	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	



			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
18.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, khususnya dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Indikator kinerja ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dalam jangka waktu lima tahun. Indikator kinerja yang ditetapkan harus bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Setiap indikator kinerja akan dihitung atau diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja yang telah tercapai pada tahap perencanaan (*ex ante*), pelaksanaan (*on-going*), dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik, khususnya dalam Dinas Kesehatan, penetapan indikator kinerja menghadapi tantangan karena karakteristik sektor publik yang berbeda dengan sektor bisnis. Salah satu permasalahan utama dalam pengukuran kinerja sektor publik adalah output yang sebagian besar berupa layanan publik yang sulit diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dinas Kesehatan harus mengembangkan indikator yang dapat mencerminkan akuntabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung harus dirancang untuk menilai pencapaian kinerja di bidang kesehatan. Indikator tersebut akan menjadi alat untuk memastikan bahwa Dinas Kesehatan berkomitmen pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan berkualitas, hingga peningkatan kesehatan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat dalam lima tahun mendatang.



Tabel IV.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan								
I.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,51	73,57	73,61	73,66	73,70	73,75	73,79
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	195	185	175	165	155	145
2.	Angka Kesakitan	%	9,43	9,13	8,83	8,53	8,23	7,93	7,63
3.	Persentase Kebahagiaan Keluarga	%	74,23	75,43	76,63	77,83	79,03	80,23	81,43
4.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran	15	13	10	8	5	3	3
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks	82,17	82,97	83,77	84,57	85,37	86,17	86,97
II.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.66:65.66	65.86:66.86	67.06:68.06	68.26:69.26	69.46:70.46	70.66:71.66	71.86:72.86
1.	Persentase Kemandirian Keluarga	%	56,17	57,37	58,57	59,77	60,97	72,17	63,37
2.	Persentase Prevalensi Stunting	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,8
3.	Persentase Ketentraman Keluarga	%	66,59	67,79	68,99	70,19	71,39	72,59	73,39



Tabel IV.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
I.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	negatif	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	195	185	175	165	155	145	
2.	Persentase Prevalensi Stunting	negatif	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,8	
3.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	56	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	68	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	65	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	86,21	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	positif	%	67,25	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	positif	%	73,63	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Jumlah kematian ibu	negatif	%	0	3	3	3	2	2	2	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
16.	Jumlah kematian balita	negatif	%	8	7	6	5	4	3	2	
17.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	positif	Persentase	0	45	50	55	61	70	80	
18.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	Persentase	62,4	80	85	90	93	95	95	
19.	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	positif	(%)	95,25	96,42	96,58	96,73	96,89	97,04	97,2	
20.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	positif	(%)	40,43	90	90	90	90	90	90	
21.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	positif	%	40	66	68	70	75	80	85	
22.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	positif	%	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
23.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	positif	%	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
24.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	komulatif	%	28	42	57	71	85	100	100	
25.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	%	56,09	70	71	72	73	74	75	
26.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	komulatif	%	20	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
27.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	komulatif	%	71	71	85	85	85	100	100	
28.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	komulatif	%	42	57	71	86	100	100	100	
29.	Presentase lanjut usia yang mandiri	komulatif	%	84,77	85,27	85,77	86,27	86,77	87,27	87,77	
30.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	positif	%	7,2	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4	
31.	Cakupan penemuan kasus TB	positif	%	45,57	90	90	90	90	90	90	
32.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Rasio	18,72	19,22	19,72	20,22	20,72	21,22	21,72	
33.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	positif	%	60	80	80	100	100	100	100	
34.	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	%	50	50	50	50	100	100	100	
35.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	positif	%	40	50	60	70	80	90	100	
36.	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	positif	%	0	50	60	70	80	90	100	
37.	Persentase sarana IRT yang memenuhi	positif	%	41,6	50	60	70	80	90	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	ketentuan										
38.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	positif	%	64	75	80	85	90	95	100	
39.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	positif	%	0	25	35	50	65	80	90	
	Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui										
40.	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil KEK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
41.	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	positif	%	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25	97,50	
42.	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	positif	%	.n/a	74,7	75,6	76,5	79,2	81	81	
43.	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	positif	%	53,43	100	100	100	100	100	100	
44.	Pelayanan KB pasca persalinan	positif	%	39	42	45	48	51	54	57	
	Anak Usia 0–23 Bulan										
45.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	positif	%	67	69	71	73	75	77	79	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
46.	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	positif	%	68	69	70	71	72	73	74	
47.	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI beragam	positif	%	81	83	85	87	89	90	92	
48.	Anak usia 6–23 bulan masih mendapat ASI	positif	%	71	72	73	74	75	76	77	
49.	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	positif	%	.n/a	81,9	82,8	83,7	84,6	85,5	85,5	
50.	Anak usia 6-23 bulan dipantau pertumbuhan & perkembangan	positif	%	87	88	89	90	91	92	93	
51.	Anak usia 6-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	positif	%	.n/a	58	63	67,5	72	76,5	81	
52.	Anak usia 0-23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	positif	%	62,4	63,4	64,4	65,4	66,4	67,4	68,4	
53.	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	positif	%	.n/a	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	
54.	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM)	positif	%	.n/a	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	
	Anak Usia 24–59 Bulan										
55.	Gizi buruk mendapat tata laksana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
56.	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	positif	%	.n/a	45	49,5	54	58,5	63	67,5	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
57.	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
58.	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	positif	%	.n/a	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	
59.	Terpantau kasus pneumonia	positif	%	.n/a	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	
60.	Mendapat obat cacing (POPM)	positif	%	.n/a	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	
	Remaja Putri										
61.	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	positif	%	84	85	86	87	88	89	90	
62.	Skrining anemia	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Calon Pengantin										
63.	Pemeriksaan kesehatan	positif	%	80	81	82	83	84	85	86	
64.	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	positif	%	80	81	82	83	84	85	86	
	Rumah Tangga Masyarakat										
65.	Kepemilikan JKN	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
66.	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	positif	%	.n/a	75,42	75,6	75,62	75,64	75,65	75,66	
II.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	negatif	Rata-rata Anak per	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	per WUS usia 15-49 Tahun		Wanita								
2.	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertiity Rate (ASFR) 15-19 tahun	positif	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20,11	20,09	20,07	20,05	20,03	20,01	19,99	
3.	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	positif	%	20,90	24,90	28,90	32,90	36,90	40,90	44,90	
4.	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand safisfied by modern meyhods)	positif	%	91,77	91,87	91,97	92,07	92,17	92,27	92,37	



Tabel IV.6
Indikator SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kesehatan										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	53,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	67,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	65,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	86,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	67,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	73.63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan berkesinambungan. Renstra ini disusun sebagai pedoman yang terarah dan terukur dalam menjalankan program serta kegiatan pembangunan kesehatan, sehingga setiap langkah yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tentu tidak dapat dicapai hanya oleh Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dunia usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, Dinas Kesehatan diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, serta mengantisipasi tantangan kesehatan global maupun lokal yang semakin kompleks.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan teknokratis, melainkan juga wujud nyata komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dalam memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan daerah. Harapannya, implementasi Renstra ini dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera, serta menjadikan Kabupaten Tana Tidung lebih tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.